



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2019

PERUBAHAN RKPD

(RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH)

2019





**PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD)
KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2019**

**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2019**



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 32 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 16 TAHUN 2018
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 263 ayat (4) dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka telah ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019;

- b. bahwa dalam rangka menjamin keselarasan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian rencana pembangunan daerah dan adanya perubahan regulasi yang berpengaruh pada dokumen rencana pembangunan daerah serta adanya perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah, kerangka pendanaan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, maka Peraturan Bupati Klaten Nomor 16 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 16 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
19. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 148);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);

25. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 66);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 66);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 136) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 178);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);

30. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
31. Peraturan Bupati Klaten Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 58);
32. Peraturan Bupati Klaten Nomor 16 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2019.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 16 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 16) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 1

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019, yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD Tahun 2019 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019.

2. Ketentuan dalam Pasal 2 diubah sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah:

- a. Pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019; dan
 - b. Pedoman dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2019.
3. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 3

Dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Kabupaten Klaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten menggunakan Perubahan RKPD Tahun 2019 sebagai pedoman penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2019.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 4

Perubahan RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Narasi Perubahan RKPD Tahun 2019, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini; dan
- b. Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 25 Juni 2019

Mengesahkan
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya
a.n BUPATI KLATEN
SEKRETARIS DAERAH
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap

BUPATI KLATEN,
Cap

ttd

ttd
Luciana Rina Damayanti, SIP, MM
Pembina Tingkat I
NIP: 19710724 199003 2 001

SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 25 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,
Cap

ttd

JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2019 NOMOR 32

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi	i
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	v
BAB I PENDAHULUAN	I
1.1. Latar Belakang.....	I – 1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	I – 2
1.3. Dasar Hukum.....	I – 3
1.4. Sistematika.....	I – 5
BAB II HASIL EVALUASI TRIWULAN II TAHUN 2019	II
2.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar	II – 3
2.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	II – 32
2.3. Urusan Pilihan	II – 54
2.4. Urusan Penunjang	II - 65
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH.....	III
3.1. Kerangka Ekonomi Daerah.....	III – 1
3.2. Kerangka Keuangan Daerah	III – 5
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV
4.1. Sasaran Pembangunan	IV – 1
4.2. Prioritas Pembangunan	IV – 11
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
BAB VI PENUTUP	VI-1

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Hasil Evaluasi Pencapaian Kinerja Pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2018 -2019	II – 1
Tabel 2. 2	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pendidikan	II – 3
Tabel 2. 3	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan	II – 11
Tabel 2. 4	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II - 17
Tabel 2. 5	Evaluasi Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	II – 22
Tabel 2. 6	Evaluasi Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	II – 24
Tabel 2. 7	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Sosial	II – 28
Tabel 2. 8	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja	II – 32
Tabel 2. 9	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II – 33
Tabel 2. 10	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pangan.....	II – 34
Tabel 2. 11	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup	II – 35
Tabel 2. 12	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil.....	II – 37
Tabel 2. 13	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	II – 38
Tabel 2. 14	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana	II – 40
Tabel 2. 15	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perhubungan	II – 43
Tabel 2. 16	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika	II – 45
Tabel 2. 17	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Koperasi dan UKM	II – 46
Tabel 2. 18	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal	II – 47
Tabel 2. 19	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olah Raga	II – 49
Tabel 2. 20	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Statistik	II – 50
Tabel 2. 21	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Persandian	II – 51
Tabel 2. 22	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan	II – 52
Tabel 2. 23	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan	II – 53
Tabel 2. 24	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kearsipan.....	II – 53
Tabel 2. 25	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kelautan dan Perikanan.....	II – 54
Tabel 2. 26	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pariwisata	II – 56
Tabel 2. 27	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pertanian	II – 57
Tabel 2. 28	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kehutanan	II – 60
Tabel 2. 29	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	II – 61
Tabel 2. 30	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perdagangan	II – 62
Tabel 2. 31	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perindustrian	II – 63
Tabel 2. 32	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Transmigrasi	II – 64
Tabel 2. 33	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perencanaan	II – 65
Tabel 2. 34	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Keuangan.....	II – 67
Tabel 2. 35	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kepegawaian dan Diklat.....	II – 68
Tabel 2. 36	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Fungsi Lainnya....	II – 69
Tabel 3.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional kurun waktu 2015-2017 dan Asumsi Tahun 2018.....	III – 1
Tabel 3.2	Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2018 (dalam Rp. Juta).....	III – 2

Tabel 3.3	Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2018 (dalam Rp. Juta)	III – 2
Tabel 3.4	Pertumbuhan PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2018.....	III – 3
Tabel 3.5	Realisasi dan Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 – 2019	III – 6
Tabel 3.6	Proyeksi Perubahan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019.....	III – 8
Tabel 3.7	Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019	III – 9
Tabel 3.8	Proyeksi Perubahan Kerangka Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019.....	III – 9
Tabel 4.1	Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2019.....	IV – 3
Tabel 4.2	Perubahan Sasaran Makro Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019.....	IV – 4
Tabel 4.3	Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 Berdasarkan Tujuan Pembangunan Daerah.....	IV – 5
Tabel 5.1	Rencana Kerja Berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2019	V – 1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1	Laju Inflasi Kabupaten Klaten Tahun 2015-2018	III – 3
-------------	---	---------

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klaten Tahun 2019 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai implementasi pelaksanaan pembangunan tahunan yang berpedoman pada RPJMD.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja beserta pendanaan. RKPD mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RKPD Provinsi Jawa Tengah dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan program pembangunan nasional dengan pembangunan daerah.

Disamping itu, dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagai pelaksanaan Visi dan Misi Daerah maka pada tataran operasional pelaksanaan pembangunan perlu ditetapkan arah kebijakan dalam rangka memberikan kepastian dan keterkaitan atas peran masing-masing dalam pencapaian tujuan yang ditetapkan. Perencanaan pembangunan tahun 2019 yang disusun dan ditetapkan pada tahun 2018 serta dijadikan pedoman dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 mengalami dinamika, baik dinamika yang berpengaruh terhadap aspek perencanaan yang disebabkan adanya kebijakan nasional maupun provinsi serta aspek pelaksanaan yang berdampak pada ketidaksesuaian kerangka kebijakan pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan kerangka keuangan daerah.

Oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian pembangunan daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hal tersebut sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada pasal 343 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Perubahan RKPD yang diikuti dengan Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya



dalam tahun berjalan menunjukkan ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Kemudian lebih lanjut dalam pasal 343 ayat (4) disebutkan Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan. Beberapa kondisi yang menjadikan dasar dilakukannya Perubahan RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2019, meliputi :

1. Adanya perubahan asumsi makro ekonomi dan keuangan daerah yang telah disepakati pada Tahun Anggaran 2019 terhadap kemampuan fiskal daerah yaitu adanya saldo anggaran lebih tahun 2018 yang akan dimanfaatkan kembali pada tahun 2019;
2. Hasil pengendalian dan evaluasi capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Tahun Anggaran 2019 yang perlu dilakukan penyesuaian;
3. Adanya perubahan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus dilakukan penyesuaian yang terkait dengan keuangan daerah maupun kebijakan teknis lainnya;
4. Kebutuhan yang bersifat prioritas untuk pencapaian tujuan, sasaran dan hasil pembangunan yang harus dicapai pada tahun 2019 maupun kebutuhan mendesak lainnya dalam upaya menangani permasalahan aktual yang berkembang.

Proses penyusunan dokumen Perubahan RKPD meliputi : (1) Penyusunan rancangan Perubahan RKPD; (2) Perumusan rancangan akhir RKPD; dan (3) Penetapan Perubahan RKPD yang selanjutnya menjadi pedoman Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Perubahan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) yang akan disepakati bersama antara Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kemudian KUPA-PPASP yang telah disepakati menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P).

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 adalah mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar



wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah dan sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) APBD Tahun Anggaran 2019.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klaten Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- a. Sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat, provinsi dan daerah yang belum terakomodir dalam APBD Tahun Anggaran 2019;
- b. Perencanaan kegiatan-kegiatan yang bersifat sangat prioritas dan kegiatan yang mengalami pergeseran termasuk prioritas Kepala Daerah yang sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. Memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) atas realisasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2018;
- d. Sebagai pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran rencana strategis Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.

1.3. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Klaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
18. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 26 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2019;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21



- Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.
 29. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019;
 30. Peraturan Bupati Klaten Nomor 16 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019;
 31. Peraturan Bupati Klaten Nomor 59 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 59 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2019.

1.4. Sistematika

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klaten Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini memuat tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Dasar Hukum, serta Sistematika Perubahan RKPD

BAB II HASIL EVALUASI TRIWULAN II TAHUN 2019

Bagian ini memuat hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah serta program dan kegiatan pada tiap urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah sampai dengan Triwulan II

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang perubahan asumsi makro ekonomi dan kerangka keuangan daerah;

BAB VI SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat sasaran dan prioritas pembangunan daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RJPMD;



BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat perubahan rencana prioritas program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah;

BAB VI PENUTUP

Pada bagian ini berisi kaidah pelaksanaan dan penutup.



BAB II

HASIL EVALUASI TRIWULAN II RKPD TAHUN 2019

Kinerja pembangunan daerah Kabupaten Klaten diukur dari ketercapaian indikator program pembangunan daerah dalam RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2019, dibandingkan dengan target yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2016-2021. Mendasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2019 sampai dengan triwulan II, dari 407 indikator program pembangunan daerah, sebanyak 123 indikator (30,22 persen) berstatus telah tercapai, 103 indikator (25,31 persen) berstatus akan tercapai dan 181 indikator (44,47 persen) berstatus perlu upaya keras.

Secara umum, penyebab beberapa indikator berstatus perlu perhatian atau upaya keras dikarenakan sampai dengan triwulan II :

- a. Kegiatannya masih berjalan, sehingga capaian belum dapat dihitung;
- b. Kegiatannya belum dapat dilaksanakan pada triwulan I dan II, karena menyesuaikan dengan aktifitas di luar rencana daerah (misalnya perhitungan laju inflasi, baru dapat dilakukan pada akhir tahun);
- c. Capaian indikator tidak dapat dihitung secara triwulan dan hanya dapat dihitung secara tahunan (data tahunan);
- d. Perhitungan capaian berdasarkan BPS.

Selain hal tersebut terdapat beberapa kondisi yang mempengaruhi pencapaian target indikator kinerja program pada triwulan II yaitu adanya dinamika kondisi ekonomi daerah khususnya fluktuasi laju inflasi di Kabupaten Klaten; adanya perubahan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus dilakukan penyesuaian yang terkait dengan keuangan daerah maupun kebijakan teknis lainnya (ketentuan peraturan perundang-undangan/regulasi dan/atau petunjuk teknis yang terbit setelah APBD ditetapkan); dan adanya penyesuaian standarisasi/satuan harga barang pada rincian belanja program kegiatan, sehingga program-program dengan status tercapai pada triwulan II dimungkinkan perlu adanya penyesuaian pendanaan untuk menjamin target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai di akhir tahun.

Rekapitulasi hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah per urusan penyelenggaraan pemerintah daerah sampai dengan triwulan II adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 1
Hasil Evaluasi Pencapaian Kinerja Pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2018 - 2019 (Triwulan II)

No	Status Pencapaian Indikator	2018		2019	
		Jml Indikator	Persentase	Jml Indikator	Persentase
1.	Telah Tercapai	278	68,98	123	30,22
2.	Akan Tercapai	125	31,02	103	25,31
3.	Perlu Upaya Keras	0	0	181	44,47
Total Indikator		403	100,00	407	100,00



Pada evaluasi ini sebagai identifikasi terhadap capaian pada triwulan II terhadap pencapaian target RKPD Tahun 2019, dengan penjelasan status capaian sebagai berikut :

- Tercapai, untuk capaian terhadap target Tahun 2019 sebesar $X = 100\%$ dengan notifikasi ● ;
- Akan tercapai, untuk capaian terhadap target Tahun 2019 sebesar $100\% > X \geq 50\%$ dengan notifikasi ►; dan
- Perlu upaya keras, untuk capaian terhadap target Tahun 2019 sebesar $X < 50\%$ dengan notifikasi ▼ .

Berikut evaluasi Triwulan II terhadap target RKPD Tahun 2019 berdasarkan urusan pemerintahan :



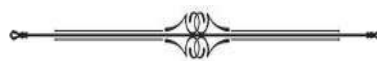
2.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

2.1.1. Pendidikan

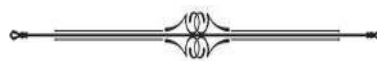
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan urusan Pendidikan sampai dengan triwulan II Tahun 2019 sebagaimana Tabel 2.2.

Tabel 2. 2
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pendidikan

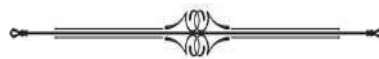
No	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RJMD	Target 2019	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2018	Realisasi Capaian RKPD TW I 2019	Realisasi Capaian RKPD TW II 2019	% Capaian RKPD s/d TW II Tahun 2019	Status Capaian Target	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pendidikan Anak Usia Dini										
		Jumlah anak umur 0-6 tahun yang mengikuti program PAUD	Anak	36.180	35.679	43,027	44,271	44,271	124,08	•	Dinas Pendidikan
2	Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun										
		Angka rata-rata lama sekolah	Th	9,4	9,2	8	9,05	9,05	98,37	▶	Dinas Pendidikan
		Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100,7	99,7	98	98,19	98,19	98,49	▶	Dinas Pendidikan
		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	98,5	97,5	98	96,57	96,57	99,05	▶	Dinas Pendidikan
		Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	70,1	69,1	81	67,18	67,18	97,22	▶	Dinas Pendidikan
		Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	%	92,4	91,4	96	87,37	87,37	95,59	▶	Dinas Pendidikan
		Tersedianya Satuan pendidikan yang terjangkau dengan berjalan kaki	%	100	100	95	731	731	731	•	Dinas Pendidikan



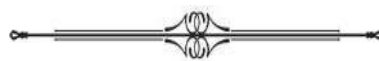
No	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RJMD	Target 2019	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2018	Realisasi Capaian RKPD TW I 2019	Realisasi Capaian RKPD TW II 2019	% Capaian RKPD s/d TW II Tahun 2019	Status Capaian Target	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		maksimum 3 Km untuk SD/MI, dan 6 Km jalan darat/air untuk SMP/MTs dari kelompok pemukiman									
		Jumlah peserta dalam Rombel SD/MI \geq 32 siswa, dan SMP/MTS \geq 36 siswa didukung ketersediaan ruang kelas untuk setiap Rombel dengan kelengkapan papan tulis, ada 1 meja dan kursi untuk setiap siswa	SD	15	24	704	704	704	2.933,33	•	Dinas Pendidikan
			SMP	0	3	104	108	108	3.600	•	Dinas Pendidikan
		Setiap SD/MI tersedia buku teks pelajaran : matematika, IPA, IPS, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Kewarganegaraan dengan ketentuan satu siswa - satu bukuteks dari masing-masing buku teks yang telah ditentukan.	SD	179	159	666	681	681	428,3	•	Dinas Pendidikan
			SMP	62	42	96	102	102	242,86	•	Dinas Pendidikan
		Setiap SD/MI tersedia alat peraga IPA: Model tubuh, bola dunia (globe), alat optik, dan kit IPA.	Sekolah	141	141	585	563	563	399,29	•	Dinas Pendidikan



No	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RJMD	Target 2019	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2018	Realisasi Capaian RKPD TW I 2019	Realisasi Capaian RKPD TW II 2019	% Capaian RKPD s/d TW II Tahun 2019	Status Capaian Target	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Setiap SD/MI tersedia 100 judul buku untuk pegangan dan 10 buku referensi, dan untuk SMP/MTs tersedia 200 judul buku untuk pegangan dan 20 buku referensi.	SD	426	416	690	674	674	162,02	•	Dinas Pendidikan
			SMP	95	90	95	94	94	104,44	•	Dinas Pendidikan
		Setiap SMP/MTS ada Ruang Laboratorium IPA dilengkapi dengan 36 meja dan kursi, alat demonstrasi dan papan eksperimen	Sekolah	26	16	91	94	94	587,5	•	Dinas Pendidikan
		Setiap SMP/MTS tersedia buku teks pelajaran, dengan ketentuan satu siswa - satu buku teks dari masing-masing buku teks yang telah ditentukan.	Sekolah	62	42	96	102	102	242,86	•	Dinas Pendidikan
		Setiap Satuan Pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan selama 34 minggu/tahun, dengan ketentuan.	SD	345	325	760	761	761	234,15	•	Dinas Pendidikan
			SMP	80	76	103	110	110	144,74	•	Dinas Pendidikan
		Setiap Satuan Pendidikan wajib menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)	SD	760	760	772	763	763	110,39	•	Dinas Pendidikan
			SMP	103	103	111	114	114	110,68	•	Dinas Pendidikan



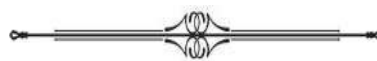
No	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RJMD	Target 2019	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2018	Realisasi Capaian RKPD TW I 2019	Realisasi Capaian RKPD TW II 2019	% Capaian RKPD s/d TW II Tahun 2019	Status Capaian Target	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Setiap Satuan Pendidikan wajib menerapkan Musyawarah Berbasis Sekolah (MBS).	SD	760	760	762	760	760	100	•	Dinas Pendidikan
			SMP	103	103	107	112	112	109,74	•	Dinas Pendidikan
		Setiap SD/Mi dan SMP/MTs ada ruangan guru dilengkapi dengan 1 meja dan kursi untuk satu guru, dan untuk SMP/MTS ada ruang kepala sekolah yang terpisah dengan ruangan guru.	SD	459	439	602	611	611	139,18	•	Dinas Pendidikan
			SMP	62	56	111	113	113	201,79	•	Dinas Pendidikan
3	Pendidikan Menengah										
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	%	63,5	62,5	54					
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	%	96,12	95,12	75					
		Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C	%	0,48	0,58	0,05					
		Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA/Paket C	%	100	100	98					
4	Pendidikan Non Formal										
		Penduduk yang berusia >15 Tahun	%	99,7	99,7	100	99,57	99,57	99,87	▶	Dinas Pendidikan



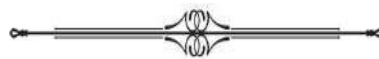
No	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RJMD	Target 2019	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2018	Realisasi Capaian RKPD TW I 2019	Realisasi Capaian RKPD TW II 2019	% Capaian RKPD s/d TW II Tahun 2019	Status Capaian Target	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		melek huruf (tidak buta aksara)									
		Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	%		0,23	0	0,6	0,6	260,87	●	Dinas Pendidikan
5	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan										
		Rasio guru terhadap murid	guru/murid	1 : 15	1 : 15	1:13	1 : 7	0,05	89,33	▶	Dinas Pendidikan
		Jumlah guru yang layak mendidik TK/RA dengan kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan	Guru	1.421	1.421	1.465	1.476	1.476	103,87	●	Dinas Pendidikan
		Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata	guru/murid/kl s	1 : 32	1 : 34	1:30	1 : 30	0,06	95,74	▶	Dinas Pendidikan
		Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	86,42	86,42	81	84,45	84,45	97,72	▶	Dinas Pendidikan
		Setiap SMP/MTs 70% gurunya harus lulusan S1/D-4, dan 35%nya sudah harus bersertifikat	Sekolah	85	85	94	90	90	105,88	●	Dinas Pendidikan
		Setiap SD/Mi ada 1 orang guru dengan mengajar 32 siswa, dan ada 6 orang guru untuk setiap Satuan Pendidikan dan untuk daerah khusus 4 orang guru.	Sekolah	552	552	700	694	694	125,72	●	Dinas Pendidikan



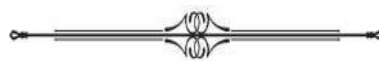
No	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RJMD	Target 2019	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2018	Realisasi Capaian RKPD TW I 2019	Realisasi Capaian RKPD TW II 2019	% Capaian RKPD s/d TW II Tahun 2019	Status Capaian Target	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Setiap SMP/MTS ada 1 orang guru untuk setiap mata pelajaran	Sekolah	73	73	99	99	99	135,62	•	Dinas Pendidikan
		Setiap SD/MI harus ada 2 orang guru dengan jenjang kelulusan S1/D-4, dan 2 orang guru diantaranya sudah harus bersertifikat	Sekolah	710	710	726	717	717	100,99	•	Dinas Pendidikan
		Setiap guru tetap wajib mengajar 37,5 jam/minggu	SD	503	483	728	731	731	151,35	•	Dinas Pendidikan
			SMP	85	65	107	108	108	166,15	•	Dinas Pendidikan
		Setiap SMP/MTs ada seorang guru dengan kualifikasi akademik S1/D-4 dan bersertifikat untuk mata pelajaran: Matematika, IPA, IPS, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Kewarganegaraan.	Sekolah	65	65	94	90	90	138,46	•	Dinas Pendidikan
		Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala sekolahnya SD/MI harus berkualifikasi S1/D-4 dan bersertifikat.	Sekolah	637	637	726	741	741	116,33	•	Dinas Pendidikan



No	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RJMD	Target 2019	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2018	Realisasi Capaian RKPD TW I 2019	Realisasi Capaian RKPD TW II 2019	% Capaian RKPD s/d TW II Tahun 2019	Status Capaian Target	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Disetiap Kabupaten/Kota semua kepala sekolahnya SMP/MTs harus berkualifikasi S1/D-4 dan bersertifikat.	Sekolah	81	81	90	94	94	116,05	•	Dinas Pendidikan
		Disetiap Kabupaten/Kota semua pengawas sekolah harus berkualifikasi S1/D-4 dan bersertifikat.	%	100	100	100	100	100	100	•	Dinas Pendidikan
		Setiap guru harus menyusun RKP dalam melaksanakan kegiatan untuk membantu Satuan Pendidikan	SD	780	670	771	765	765	114,18	•	Dinas Pendidikan
			SMP		98	111	114	114	116,33	•	Dinas Pendidikan
		Setiap pengawas wajib melakukan kunjungan ke semua sekolah minimal satu kali setiap bulan, dengan waktu 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan	SD	703	693	733	737	737	106,35	•	Dinas Pendidikan
			SMP		106	92	109	109	102,83	•	Dinas Pendidikan
		Setiap guru wajib menerapkan Rencana Kerja Pembelajaran (RKP)	SD	703	693	771	765	765	110,39	•	Dinas Pendidikan
			SMP		106	111	114	114	107,55	•	Dinas Pendidikan
		Setiap guru wajib mengembangkan dan menerapkan program penilaian pendidikan	SD	703	693	772	765	765	110,39	•	Dinas Pendidikan
			SMP		106	112	114	114	107,55	•	Dinas Pendidikan



No	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RJMD	Target 2019	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2018	Realisasi Capaian RKPD TW I 2019	Realisasi Capaian RKPD TW II 2019	% Capaian RKPD s/d TW II Tahun 2019	Status Capaian Target	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Setiap Kepala Sekolah wajib melakukan supervisi kelas, minimal 2 kali per semester	SD	703	693	769	763	763	110,1	●	Dinas Pendidikan
			SMP		106	107	106	106	100	●	Dinas Pendidikan
		Setiap guru wajib sampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran kepada Kepala sekolah	SD	703	693	772	765	765	110,39	●	Dinas Pendidikan
			SMP		106	110	114	114	107,55	●	Dinas Pendidikan
		Setiap Kepala Sekolah wajib menyampaikan hasil UAS, ulangan kenaikan kelas (UKK) kepada orang tua siswa dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan.	%	100	100	99	114	114	114	●	Dinas Pendidikan
	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan										
		Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	99,75	99,73	100	99,57	99,57	99,84	▶	Dinas Pendidikan
	Manajemen Pelayanan Pendidikan										
		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	96,65	96,63	88	95,48	95,48	98,81	▶	Dinas Pendidikan



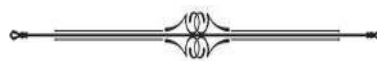
2.1.2. Kesehatan

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan urusan Kesehatan sampai dengan triwulan II Tahun 2019 sebagaimana Tabel 2.3.

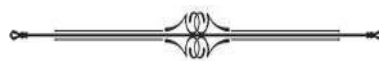
Tabel 2. 3
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan

No	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RJMD	Target 2019	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2018	Realisasi Capaian RKPD TW I 2019	Realisasi Capaian RKPD TW II 2019	% Capaian RKPD s/d TW II Tahun 2019	Status Capaian Target	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Obat dan Perbekalan Kesehatan										
		% obat generik berlogo dalam persediaan obat	%	100	99	99,16	0	0	0	▼	Dinas Kesehatan
2	Upaya Kesehatan Masyarakat										
		Cakupan kunjungan ibu hamil K4	%	100	98	92,85	20,85	36,35	37,09	▼	Dinas Kesehatan
		Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	85	83	101,58	19,88	35,24	42,46	▼	Dinas Kesehatan
		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi kebidanan	%	100	100	100	22,12	40,48	40,48	▼	Dinas Kesehatan
		Cakupan pelayanan nifas	%	100	96	97,2	20,1	36,79	38,32	▼	Dinas Kesehatan
		Cakupan neunafus dengan komplikasi yang ditangani	%	85	83	57,05	13,02	24,85	29,94	▼	Dinas Kesehatan
		Cakupan kunjungan bayi	%	100	96	99,67	22,6	37,9	39,48	▼	Dinas Kesehatan
		Angka kelangsungan hidup bayi	%	994	992	989,85	986,94	989,14	99,71	►	Dinas Kesehatan

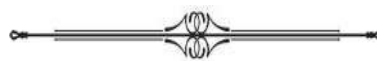
No	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RJMD	Target 2019	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2018	Realisasi Capaian RKPD TW I 2019	Realisasi Capaian RKPD TW II 2019	% Capaian RKPD s/d TW II Tahun 2019	Status Capaian Target	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Cakupan pelayanan anak balita	%	100	96	95,25	19,7	35,32	36,79	▼	Dinas Kesehatan
		Cakupan peserta KB aktif	%	75	73	83,92	67,85	73,83	101,14	●	Dinas Kesehatan
		Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan di kabupaten	%	100	100	100		0	0	▼	Dinas Kesehatan
3	Pengawasan Obat dan Makanan										
		% apotik, toko obat dan tempat penjualan makanan yang dilakukan pengawasan	%	100	100	100		0	0	▼	Dinas Kesehatan
		% sekolah yang dilakukan pemeriksaan jajanan anak sekolah	%	100	100	100		0	0	▼	Dinas Kesehatan
4	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat										
		Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan sederajat	%	100	100	100	0	0	0	▼	Dinas Kesehatan
		Cakupan desa siaga aktif	%	100	100	100	100	100	100	●	Dinas Kesehatan
5	Perbaikan Gizi Masyarakat										
		Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100	100	●	Dinas Kesehatan



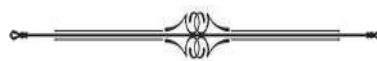
No	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RJMD	Target 2019	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2018	Realisasi Capaian RKPD TW I 2019	Realisasi Capaian RKPD TW II 2019	% Capaian RKPD s/d TW II Tahun 2019	Status Capaian Target	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		% Ibu hamil mendapatkan tablet Fe	%	98	98	93,2	21,02	36,62	37,37	▼	Dinas Kesehatan
		% bayi yang dapat ASI Eksklusif	%	79	77	72	79,9	80,55	104,61	●	Dinas Kesehatan
6	Pengembangan Lingkungan Sehat										
		Persentase Pengelolaan limbah medis dan non medis	%	100	100	100	100	100	100	●	RSD Bagaswaras
		Cakupan desa <i>open defecation free</i> (ODF)	%	45	35	78,55	6	32	91,43	►	Dinas Kesehatan
		Persentase penggunaan jamban	%	100	100	95,07	98,84	98,84	98,84	►	Dinas Kesehatan
		Persentase penggunaan air bersih	%	100	100	98,34	100	100	100	●	Dinas Kesehatan
7	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular										
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%		42	120	15,7	20,1	47,86	▼	Dinas Kesehatan
		Cakupan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	100	100	100	100	100	100	●	Dinas Kesehatan
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100	100	100	100	●	Dinas Kesehatan
		Cakupan desa /kelurahan Universal Chlid immunication (UCI)	%	100	100	100	311	264	65,84	►	Dinas Kesehatan



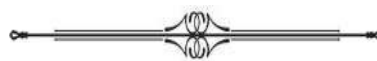
No	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RJMD	Target 2019	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2018	Realisasi Capaian RKPD TW I 2019	Realisasi Capaian RKPD TW II 2019	% Capaian RKPD s/d TW II Tahun 2019	Status Capaian Target	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100	100	100	5	10	100	●	Dinas Kesehatan
		Jumlah kasus HIV/AIDS yang ditangani	Kasus	168	148	89	63	87	58,78	▶	Dinas Kesehatan
8	Standarisasi Pelayanan Kesehatan										
		Angka Kesakitan	%	100	100	66,67	10	28	28	▼	Dinas Kesehatan
9	Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin										
		Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	5	5	193,44	0	0	0	▼	RSD Bagaswaras
		Cakupan pelayanan kesehatan pasien masyarakat miskin	%	100	98	90,96	0	0	0	▼	Dinas Kesehatan
10	Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan prasarana sarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya										
		% penduduk yang memanfaatkan Puskesmas	%	90	86	119,05	14,32	23,36	27,16	▼	Dinas Kesehatan
		Cakupan Pelayanan Puskesmas	%	100	100	100	0	0	0	▼	Dinas Kesehatan
		Cakupan Pelayanan Puskesmas Pembantu	%	100	100	100	0	0	0	▼	Dinas Kesehatan



No	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RJMD	Target 2019	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2018	Realisasi Capaian RKPD TW I 2019	Realisasi Capaian RKPD TW II 2019	% Capaian RKPD s/d TW II Tahun 2019	Status Capaian Target	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Rasio Puskesmas, poliklinik, Pustu per satuan penduduk	%	1	1	4,4	0	0	0	▼	Dinas Kesehatan
11	Pengadaan, dan Peningkatan sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata										
		% Penduduk yang memanfaatkan Rumah Sakit	%	3,3	3	170,69	2,21	1,51	62	►	RSD Bagaswaras
		% obat generik berlogo dalam persediaan RSUD	%	80	76	65,43	49	51	67,11	►	RSD Bagaswaras
12	Pemeliharaan sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata										
		Persentase sarana dan prasarana rumah sakit dalam kondisi baik	%	100	100	97	95,67	95,67	95,67	►	RSD Bagaswaras
13	Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan										
		Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk	%	2,70	2,72	2,7	0	0	0	▼	Dinas Kesehatan



No	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RJMD	Target 2019	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2018	Realisasi Capaian RKPD TW I 2019	Realisasi Capaian RKPD TW II 2019	% Capaian RKPD s/d TW II Tahun 2019	Status Capaian Target	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Rasio dokter keluarga per 1000 keluarga	%	9,95	10,03	10	0	0	0	▼	Dinas Kesehatan
		Rasio dokter gigi per 100.000 penduduk	%	1,25	1,26	1,27	0	0	0	▼	Dinas Kesehatan
		Rasio apoteker per 100.000 penduduk	%	2,44	2,46	2,47	0	0	0	▼	Dinas Kesehatan
		Rasio Bidan per 100.000 penduduk	%	31,16	31,42	31,25	0	0	0	▼	Dinas Kesehatan
14	Manajemen Informasi dan Regulasi Kesehatan										
		Rata-rata % anggaran kesehatan dalam APBD	%	11,9	11,8	1,93	0	0	0	▼	Dinas Kesehatan
15	Pelayanan Kesehatan										
		LOS	hari	4	5	3,21	3,37	3,68	73,5	►	RSD Bagaswaras
		BOR	%	70	62	60,91	79,07	79,99	129,02	●	RSD Bagaswaras
		Persentase jumlah kasus kematian pasien terhadap total jumlah pasien	%	20	30	31,08	36,49	35,51	118,35	●	RSD Bagaswaras

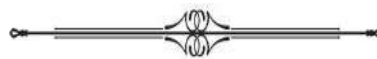


2.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

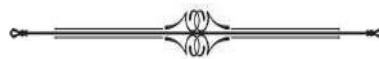
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai dengan triwulan II Tahun 2019 sebagaimana Tabel 2.4.

Tabel 2. 4
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

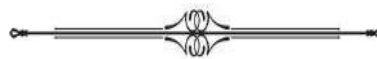
No	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RJMD	Target 2019	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2018	Realisasi Capaian RKPD TW I 2019	Realisasi Capaian RKPD TW II 2019	% Capaian RKPD s/d TW II Tahun 2019	Status Capaian Target	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pembangunan Jalan dan Jembatan										
		Panjang jalan dilalui Roda 4	Km	769,63	769,63	769,63		769,63	100	●	Dinas PU dan PR
		Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	Km	506,42	469,27	470,61		554,28	120	●	Dinas PU dan PR
2	Pembangunan Drainase/Gorong-gorong										
		Gorong-gorong dalam kondisi baik	%	16,14	16,1					▼	Dinas PU dan PR
3	Pembangunan Turap/talud/bronjong										
		Pembangunan Turap/talud/bronjong	Km	11	1	1,3		0	0	▼	Dinas PU dan PR
4	Peningkatan Prasarana dan Sarana Kebinamargaan										
		Jumlah alat berat laik operasi	Unit	24	4	31		31	775	●	Dinas PU dan PR



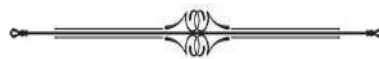
No	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RJMD	Target 2019	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2018	Realisasi Capaian RKPD TW I 2019	Realisasi Capaian RKPD TW II 2019	% Capaian RKPD s/d TW II Tahun 2019	Status Capaian Target	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Pembangunan Infrastruktur Pedesaan/Kelurahan										
		Lingkungan Pemukiman Layak	ha							▼	Dinas PU dan PR
6	Perencanaan Tata Ruang										
		Dokumen RTRW, RDTR dan RTBL	dokumen	11	2	2		1	50	►	Dinas PU dan PR
		Aplikasi sistem informasi geografis	Jenis	6	1	1		0	0	▼	Dinas PU dan PR
		Jumlah peta-peta tematik	Jenis	12	2	2		0	0	▼	Dinas PU dan PR
7	Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang										
		Prosentase Ruang Terbuka Hijau Publik dari luas kawasan perkotaan	%	16	11	1,47		0	0	▼	Dinas PU dan PR
		Cakupan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang	desa/kel.	401	401	33		33	8	▼	Dinas PU dan PR
		Persentase jumlah izin IMB yang diterbitkan	%	26	24					▼	Dinas PU dan PR
8	Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan gedung										
		Gedung Kantor Pemerintah dalam kondisi baik	%							▼	Dinas PU dan PR



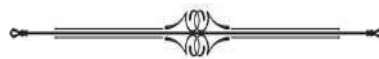
No	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RJMD	Target 2019	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2018	Realisasi Capaian RKPD TW I 2019	Realisasi Capaian RKPD TW II 2019	% Capaian RKPD s/d TW II Tahun 2019	Status Capaian Target	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Pembangunan Gedung Pemerintah (Gedung Pemda II, 8 Kantor kecamatan, dan 5 kelurahan)	Paket	5	5					▼	Dinas PU dan PR
		Pengembangan dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (Replikasi tempat beribadatan yang terintegrasi dengan taman lampion)	lokasi		3					▼	Dinas PU dan PR
9	Penataan dan Pengelolaan Tata Bangunan										
		Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	%	5,9	5,7					▼	Dinas PU dan PR
		Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan liar	Ha	377	417					▼	Dinas PU dan PR
10	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya										
		Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	Ha	14.076	600	1612		45	7,5	▼	Dinas PU dan PR



No	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RJMD	Target 2019	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2018	Realisasi Capaian RKPD TW I 2019	Realisasi Capaian RKPD TW II 2019	% Capaian RKPD s/d TW II Tahun 2019	Status Capaian Target	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya										
		Kondisi sungai dalam keadaan baik	M		500	270		0	0	▼	Dinas PU dan PR
		Sumber air dalam kondisi baik	Unit	159	2	119	1	1	50	►	Dinas PU dan PR
12	Pengendalian Banjir										
		Luas Wilayah Kebanjiran	Ha	2.620	100					▼	Dinas PU dan PR
		Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 6 jam) lebih dari 2 kali setahun (Lingkungan permukiman perkotaan)	%	40,3	40,15					▼	Dinas PU dan PR
13	Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan jembatan										
		Volume rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	m2	230.000	4.500	25.000	10.000	11.500	255,56	●	Dinas PU dan PR
14	Penataan Trotoar dan jalan										



No	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RJMD	Target 2019	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2018	Realisasi Capaian RKPD TW I 2019	Realisasi Capaian RKPD TW II 2019	% Capaian RKPD s/d TW II Tahun 2019	Status Capaian Target	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Rasio tratoar yang tertata	%	337	56,5	57,1	58,18	58,18	102,97	●	Dinas PU dan PR
15	Pengembangan Kelembagaan Pengelola Irigasi dan Sumber Daya Air Lainnya										
		Jumlah lembaga pengelola irigasi dan sumber daya air lainnya	lembaga	410	60	401	0	401	668,33	●	Dinas PU dan PR
16	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan										
		Persentase pengangkutan sampah	%	40	30	16,16		16,63	55,43	▶	Dinas PU dan PR
		Jumlah tempat pemrosesan sampah	Lokasi	5	1	1		1	100	●	Dinas PU dan PR
17	Peningkatan Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan										
		Persentase tersedianya 7 (tujuh) jenis informasi tingkat kab/kota pada Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi (SIPJAKI)	%	100	100					▼	Dinas PU dan PR
18	Pengembangan Kinerja pengelolaan air minum dan limbah									▼	Dinas PU dan PR



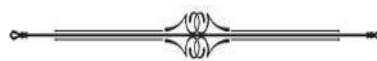
No	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RJMD	Target 2019	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2018	Realisasi Capaian RKPD TW I 2019	Realisasi Capaian RKPD TW II 2019	% Capaian RKPD s/d TW II Tahun 2019	Status Capaian Target	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah pengadaan truk tinja	unit		2		0	0	0	▼	Dinas PU dan PR
19	Pemanfaatan Ruang										
		Jumlah dokumen rekomendasi tata ruang daerah	jenis		6		0	1	16,67	▼	Dinas PU dan PR

2.1.4. Perumahan dan Pemukiman

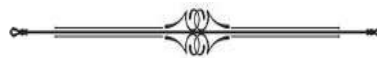
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan urusan Perumahan dan Pemukiman sampai dengan triwulan II Tahun 2019 sebagaimana Tabel 2.5 berikut.

Tabel 2. 5
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Pemukiman

No	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RJMD	Target 2019	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2018	Realisasi Capaian RKPD TW I 2019	Realisasi Capaian RKPD TW II 2019	% Capaian RKPD s/d TW II Tahun 2019	Status Capaian Target	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Perumahan dan Pemukiman										
		Jumlah bangunan Ber-IMB	ijin		700	639	89	141	33	▼	Dinas Perwaskim
		Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	%	0,074	0,07	0,5	0,125	0,125	357,14	●	Dinas Perwaskim
2	Program 100 0 100										



No	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RJMD	Target 2019	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2018	Realisasi Capaian RKPD TW I 2019	Realisasi Capaian RKPD TW II 2019	% Capaian RKPD s/d TW II Tahun 2019	Status Capaian Target	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah Masyarakat yang TIDAK terlayani Sarana Air Minum untuk minum, mandi, dan cuci (perpipaan atau non perpipaan terlindungi yang layak) (Unit rumah tangga)	unit rumah tangga (total rumah tangga 182.324 unit)		9.712	23156	0	0	0	▼	Dinas Perwaskim
		Persentase berkurangnya luasan pemukiman kumuh di kawasan perkotaan (Berdasarkan SK Bupati Klaten Tahun 2014)	hektar area (236.50 ha)		51,54	23,97	23,97	23,97	92,93	►	Dinas Perwaskim
		Jumlah Masyarakat yang TIDAK memiliki akses jamban keluarga / jamban bersama (5 KK/jamban) (Unit rumah tangga)	unit rumah tangga (total rumah tangga 182.324 unit)		3.580	7694	7694	15388	429,83	●	Dinas Perwaskim
		Saluran pembuangan air limbah rumah tangga TERCAMPUR dengan saluran drainase lingkungan (%)	unit rukun tetangga (total RT 5.132)		63	2209	2209	4418	7012,7	●	Dinas Perwaskim
3	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa										
		Jumlah rumah tidak layak huni	Unit		6000	0	0	0	0	▼	Dinas Perwaskim

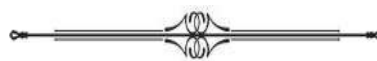


2.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

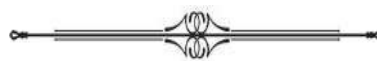
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sampai dengan triwulan II Tahun 2019 sebagaimana Tabel 2.6.

Tabel 2. 6
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

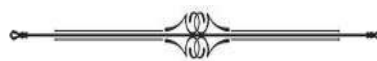
No	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RJMD	Target 2019	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2018	Realisasi Capaian RKPD TW I 2019	Realisasi Capaian RKPD TW II 2019	% Capaian RKPD s/d TW II Tahun 2019	Status Capaian Target	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Peningkatan disiplin aparaturnya										
		Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Kabupaten/Kota	%	92,25	91,75	1.159	15	50	54,50	►	Satpol PP
2	Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan										
		Cakupan penanganan barang kena cukai	%	83,46	79,97	17.258	6,8	26,8	33,51	▼	Satpol PP
3	Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan										
		Cakupan pengembangan dan penanaman nilai-nilai kejujuran	kegiatan	20	20	24	4	17	85,00	►	Satpol PP
4	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan										



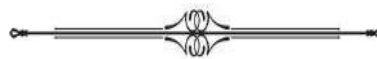
No	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RJMD	Target 2019	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2018	Realisasi Capaian RKPD TW I 2019	Realisasi Capaian RKPD TW II 2019	% Capaian RKPD s/d TW II Tahun 2019	Status Capaian Target	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Cakupan pencegahan konflik sosial/sara di daerah	ds/kecamatan	401	401	401	100	200	49,88	▼	Kesbangpol
		Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	ds/kecamatan	401	401	355	75	170	42,39	▼	Satpol PP
		Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di kab/kota	%	89,63	89,63	89,63	89,63	89,63	100,00	●	Satpol PP
5	Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan										
		Rasio Pos Siskamling per jumlah penduduk	%	2,43	2,45	9.592	2,43	2,43	99,18	▶	Satpol PP
		Jumlah Demo	Kejadian	46	8	3	2	4	50,00	▶	Satpol PP
6	Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal										
		Rasio jumlah Polisi pamong Praja per 10000 penduduk	%	0,4	0,4	51	0,4	0,4	100,00	●	Satpol PP
7	Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan										



No	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RJMD	Target 2019	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2018	Realisasi Capaian RKPD TW I 2019	Realisasi Capaian RKPD TW II 2019	% Capaian RKPD s/d TW II Tahun 2019	Status Capaian Target	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Rasio penanganan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	%	89,63	89,63	89,63				▼	Kecamatan
8	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan										
		Rasio RT terhadap total jumlah KK	%	40,19	40,19	40,19				▼	Kecamatan
		Rasio RW terhadap total jumlah KK	%	104,51	104,5	104,5				▼	Kecamatan
9	Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Kemasyarakatan Kelurahan										
		Rata-rata jumlah binaan lembaga pemberdayaan masyarakat	orang	50	50	50				▼	Kecamatan
10	Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)										
		jumlah penanganan kasus penyakit masyarakat	Jumlah penyelesaian	205	215	83	22	64	29,77	▼	Satpol PP
11	Peningkatan dan Pembinaan Kehidupan Sosial Politik										



No	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RJMD	Target 2019	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2018	Realisasi Capaian RKPD TW I 2019	Realisasi Capaian RKPD TW II 2019	% Capaian RKPD s/d TW II Tahun 2019	Status Capaian Target	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kegiatan politik di daerah	kegiatan	24	4	4	1	2	50,00	►	Kesbangpol
		Jumlah LSM/Ormas/OKP	LSM/Ormas/OKP	101	101	87	0	0	0,00	▼	Kesbangpol
12	Pengembangan Wawasan Kebangsaan										
		Jumlah dialog/saresehan kebangsaan	kegiatan	36	6	6	2	3	50,00	►	Kesbangpol
13	Pendidikan politik masyarakat										
		Jumlah TP PKK Desa yang mengikuti dialog wawasan kebangsaan	orang		200	300	0	0	0,00	▼	Kesbangpol
14	Peningkatan Pengelolaan Administrasi Organisasi Kemasyarakatan										
		Pembinaan Jumlah LSM/Ormas	kegiatan	36	6	5	0	1	16,67	▼	Kesbangpol

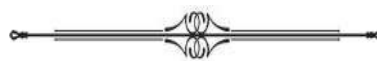


2.1.6. Sosial

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan urusan Sosial sampai dengan triwulan II Tahun 2019 sebagaimana Tabel 2.7.

Tabel 2. 7
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Sosial

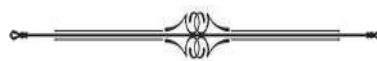
No	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RJMD	Target 2019	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2018	Realisasi Capaian RKPD TW I 2019	Realisasi Capaian RKPD TW II 2019	% Capaian RKPD s/d TW II Tahun 2019	Status Capaian Target	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pembinaan eks penyandang penyakit social (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit social laninnya)										
		Cakupan penanganan PMKS	%	46,78	44,78	24,95				▼	DissosPPPAKB
2	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial										
		Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE)	%	1,3	1,1	0,31	1,2	1,2	92,3	►	DissosPPPAKB
3	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial										
		Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	3,94	3,54	2,7	2,1	2,1	102,85	•	DissosPPPAKB



No	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RJMD	Target 2019	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2018	Realisasi Capaian RKPD TW I 2019	Realisasi Capaian RKPD TW II 2019	% Capaian RKPD s/d TW II Tahun 2019	Status Capaian Target	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya										
		Jumlah keluarga rawan sosial	orang	400	30	80		15,4	50	►	DissosPPPAKB
5	Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma										
		Persentase penyandang cacat dan trauma yang telah mendapat bantuan	%	17,5	3,5	2,7		2	57,14	►	DissosPPPAKB
6	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial										
		Jumlah organisasi kelembagaan sosial	orsos	25	-	13	0	0	0,00	▼	Bagian Kesra Setda
7	Peningkatan Keagamaan										
		Jumlah petugas haji	TPHD	24	4	6	0	0	0,00	▼	Bagian Kesra Setda
			TKHD	24	4	1	0	0	0,00		Bagian Kesra Setda
		Jumlah pemberangkatan haji	orang	5.950	800	987	0	893	111,63	●	Bagian Kesra Setda
8	Peningkatan pelayanan kesehatan lansia										
		Peresentase (%) lansia skala kab/ kota yang memperoleh bantuan layanan kesehatan	%	0,24	0,24	0,28		0,24	100	●	DissosPPPAKB

No	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RJMD	Target 2019	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2018	Realisasi Capaian RKPD TW I 2019	Realisasi Capaian RKPD TW II 2019	% Capaian RKPD s/d TW II Tahun 2019	Status Capaian Target	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial										
		Penanaman nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan Keuangan	kegiatan	12	2	2	-	-	-	▼	Bag. Kesra Setda
10	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana										
		Cakupan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi paska bencana	%	100	100	100	0	0	0	▼	BPBD
11	Penanganan darurat Bencana										
		Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100	100	0	0	0	▼	BPBD
		Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	100	100	100	0	0	0	▼	BPBD
12	Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana										
		Jumlah relawan yang terlatih tanggap bencana	orang	1350	225	390	0	0	0	▼	BPBD
		Desa Tangguh Bencana	Desa	25	2	3	0	0	0	▼	BPBD

No	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RJMD	Target 2019	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2018	Realisasi Capaian RKPD TW I 2019	Realisasi Capaian RKPD TW II 2019	% Capaian RKPD s/d TW II Tahun 2019	Status Capaian Target	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kota Tangguh	Kab	1	1	0	0	0	0	▼	BPBD
13	Pencegahan Dini dan Penanggulangan korban bencana alam										
		Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	ds/kel	401	401	401	0	0	0	▼	BPBD
		Cakupan kawasan bencana	ds/kel	401	401	401	0	0	0	▼	BPBD
		Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	15 menit/ 7 Km	2,14	2,14	2,14	0	0	0	▼	BPBD
14	Pembinaan panti asuhan/panti jompo										
		Terbinanya panti asuhan/panti jompo	panti	11	11	1	6	6	54,54	►	DissosPPPAKB
15	Peningkatan penanggulangan narkoba, Penyakit Menular Seksual (PMS) termasuk HIV/AIDS										
		Proses pendampingan bagu penderita HIV/AIDS	%	100	100	100	0	0	0	▼	DissosPPPAKB
16	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial										
		Persentase (%) penanganan PMKS skala kab/kota	%	97,3	95,6	41,58		95	99,3	►	DissosPPPAKB



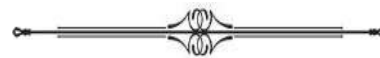
2.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

2.2.1. Tenaga Kerja

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan urusan Tenaga Kerja sampai dengan triwulan II Tahun 2019 sebagaimana Tabel 2.8.

Tabel 2. 8
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RJMD	Target 2019	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2018	Realisasi Capaian RKPd TW I 2019	Realisasi Capaian RKPd TW II 2019	% Capaian RKPd s/d TW II Tahun 2019	Status Capaian Target	OPD Penanggung Jawab
1	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja										
		Rasio daya serap tenaga kerja	%	1.818	1.795	1.667,22	0	897	49,97	▼	Disperinaker
		Angka partisipasi angkatan kerja	%	69	69	73,58	0	35	50,72	►	Disperinaker
		Rasio penduduk yang bekerja	%	1,09	1,05	0,87	0	0,52	49,52	▼	Disperinaker
2	Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan										
		Keselamatan dan Perlindungan		13	13	4,73	0	0	0	▼	Disperinaker
3	Peningkatan Kesempatan Kerja										
		Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	99	99	91,3	0	45	45,45	▼	Disperinaker



2.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sampai dengan triwulan II Tahun 2019 sebagaimana Tabel 2.9.

Tabel 2. 9
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RJMD	Target 2019	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2018	Realisasi Capaian RKPD TW I 2019	Realisasi Capaian RKPD TW II 2019	% Capaian RKPD s/d TW II Tahun 2019	Status Capaian Target	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										
		Keserasian Kebijakan	dokumen	12	10	3		3	30	▼	DissosPPPAKB
		Produk kebijakan PUG dan Anak								▼	DissosPPPAKB
2	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan gender dan anak										
		Jumlah SKPD yang menerapkan perencanaan dan penganggaran responsif gender	buah	20	16	20		1	6,25	▼	DissosPPPAKB
		Jumlah SKPD yang memiliki data gender dan anak secara sektoral	buah	21	19	16		0	0	▼	DissosPPPAKB
3	Peningkatan Kualitas Hidup dan perlindungan perempuan dan anak										
		penyelesaian pengaduan perlindungan	indeks	96,15	96,05	83		75	78.08	►	DissosPPPAKB

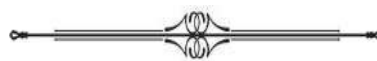
No	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RJMD	Target 2019	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2018	Realisasi Capaian RKPD TW I 2019	Realisasi Capaian RKPD TW II 2019	% Capaian RKPD s/d TW II Tahun 2019	Status Capaian Target	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		perempuan dan anak dari tindakan kekerasan									
4	Peningkatan peran serta anak dan kesetaraan gender dalam pembangunan										
		jumlah forum anak yang terlibat dalam pengambilan kebijakan	buah	40	30	20		26	86	▶	DissosPPPAKB

2.2.3. Pangan

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan urusan Pangan sampai dengan triwulan II Tahun 2019 sebagaimana Tabel 2.10.

Tabel 2. 10
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pangan

No	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RJMD	Target 2019	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2018	Realisasi Capaian RKPD TW I 2019	Realisasi Capaian RKPD TW II 2019	% Capaian RKPD s/d TW II Tahun 2019	Status Capaian Target	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan										
		Penguatan Cadangan Pangan	%	90	82	80	30	60	73,17	▶	DPKPP
		Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah	%	100	100	71,8	30	60	60	▶	DPKPP



No	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RJMD	Target 2019	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2018	Realisasi Capaian RKPD TW I 2019	Realisasi Capaian RKPD TW II 2019	% Capaian RKPD s/d TW II Tahun 2019	Status Capaian Target	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	%	100	100	70	30	65	65	►	DPKPP
		Pengawasan dan pembinaan Keamanan Pangan	%	77	75		30	40	40	▼	DPKPP
		Penanganan Daerah Rawan Pangan	%	90	82		30	60	60	►	DPKPP
2	Peningkatan Ketahanan Pangan										
		Pemantauan harga pokok masyarakat	komoditas	72	18		16	16	88,89	►	Bag. Perekonomian Setda

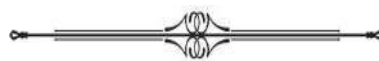
2.2.4. Lingkungan Hidup

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup sampai dengan triwulan II Tahun 2019 sebagaimana Tabel 2.11.

Tabel 2. 11
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup

No	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RJMD	Target 2019	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2018	Realisasi Capaian RKPD TW I 2019	Realisasi Capaian RKPD TW II 2019	% Capaian RKPD s/d TW II Tahun 2019	Status Capaian Target	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Lingkungan Hidup										
		Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	%	0,074	0,07	0,068	0	0	0	▼	DLHK
		Jumlah bank sampah aktif dan 3R		18	3	5	3	3	100	●	DLHK
2	Pengendalian Pencemaran dan										

No	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RJMD	Target 2019	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2018	Realisasi Capaian RKPD TW I 2019	Realisasi Capaian RKPD TW II 2019	% Capaian RKPD s/d TW II Tahun 2019	Status Capaian Target	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Perusakan Lingkungan Hidup										
		Pengkajian Pencemaran status mutu air	lokasi di sungai	60	10	13	10	10	100	•	DLHK
			sumur	25	5		0	0	0	▼	DLHK
		Cakupan Pengawasan terhadap pelaksanaan amdal	%	100	100	100	30	50	50	►	DLHK
3	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya alam										
		Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air	ha	30	5	5	0	0	0	▼	DLHK
4	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)										
		Rasio Ruang Terbuka Hijau Per satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	%	11,5	10,5		0	0	0	▼	DLHK
		Jumlah Penataan Taman kota	titik/lok	6	1	1	1	1	100	•	DLHK
		Luasan hutan Kota	ha	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	100	•	DLHK
5	Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan lingkungan Hidup										
		Kapasitas SDA Sekolah Adiwiyata			1	1			0	▼	DLHK
			sekolah	33	33	35	10	35	106,06	•	DLHK
6	Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup										
		Tersedianya Informasi Lingkungan Hidup		3	3	3	1	1	33,33	▼	DLHK

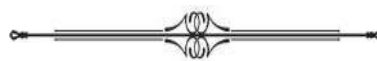


2.2.5. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil sampai dengan triwulan II Tahun 2019 sebagaimana Tabel 2.12.

Tabel 2.12
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

No	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RJMD	Target 2019	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2018	Realisasi Capaian RKPD TW I 2019	Realisasi Capaian RKPD TW II 2019	% Capaian RKPD s/d TW II Tahun 2019	Status Capaian Target	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penataan Administrasi Kependudukan										
		Jumlah bayi berakte kelahiran	Jumlah Akte	157.110	138.310	99.299	99.423	99.548	72	►	Dinas Dukcapil
		Jumlah Akte Pernikahan per tahun	Jumlah Akte	3.150	525	1.051	97	202	38	▼	Dinas Dukcapil
		Kepemilikan KTP	Jumlah KTP	1.171.750	946.150	998.756	1.011.915	1.016.217	107	●	Dinas Dukcapil
		Jumlah Akte Kematian	Jumlah Akte	5.805	475	471	826	1.603	337	●	Dinas Dukcapil



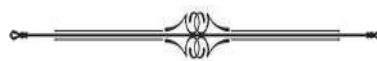
2.2.6. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa sampai dengan triwulan II Tahun 2019 sebagaimana Tabel 2.13.

Tabel 2.13
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat

No	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RJMD	Target 2019	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2018	Realisasi Capaian RKPD TW I 2019	Realisasi Capaian RKPD TW II 2019	% Capaian RKPD s/d TW II Tahun 2019	Status Capaian Target	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa										
		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	Unit	6000	1000	2500	0	0	0	▼	Dinas Perwaskim
2	Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga										
		PKK Aktif	Lembaga	428	428	428	428	428	100	●	Dinas Permasdes
3	Pengembangan lembaga ekonomi perdesaan										
		Jumlah BUMDes	BUMDes	175	25	7	25	25	100	●	Dinas Permasdes
		Jumlah Pasar Desa	Pasar Desa	42	42	42	42	42	100	●	Dinas Permasdes
		Jumlah Rintisan BUMADes (Eks. UPK PNPM)	Unit	5	1	1	1	1	100	●	Dinas Permasdes
4	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan										
		Jumlah rumah tangga miskin	Jiwa	100.469	133.057	631.780	0	0	0	▼	Dinas Permasdes

No	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RJMD	Target 2019	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2018	Realisasi Capaian RKPD TW I 2019	Realisasi Capaian RKPD TW II 2019	% Capaian RKPD s/d TW II Tahun 2019	Status Capaian Target	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LMPD/K)	Lembaga	401	401	401	401	401	100	●	Dinas Permasdes
5	Pembangunan Kawasan Perdesaan										
		Kawasan Desa Mandiri Pangan	Kawasan	5	1	3	0	0	0	▼	Dinas Permasdes
		Kawasan Desa Minapolitan	Kawasan	5	1	1	0	0	0	▼	Dinas Permasdes
		Kawasan Desa ATP (Agro Teknopark)	Kawasan	1	1	1	0	0	0	▼	Dinas Permasdes
		Kawasan Desa Wisata	Kawasan	14	13	3	0	0	0	▼	Dinas Permasdes
		Kawasan Desa Vokasi	Kawasan	1	1	1	0	0	0	▼	Dinas Permasdes
6	Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan										
		Jumlah LKM/BKM/LPMD	LKM/BKM/LPMD			782				▼	Dinas Permasdes
		LKM/BKM/LPMD									Dinas Permasdes
7	Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan										
		Jumlah kelurahan	10			10		10	100	●	Dinas Permasdes



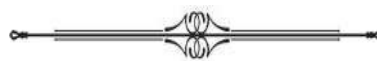
2.2.7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan urusan Keluarga Berencana sampai dengan triwulan II Tahun 2019 sebagaimana Tabel 2.14.

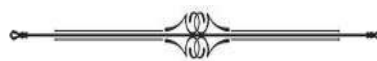
Tabel 2.14
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RJMD	Target 2019	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2018	Realisasi Capaian RKPD TW I 2019	Realisasi Capaian RKPD TW II 2019	% Capaian RKPD s/d TW II Tahun 2019	Status Capaian Target	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Keluarga Berencana	Persentase KB Aktif	%	79,4	78,22	69,12		71,23	91,06	▶	DissosPPPAKB
2	Kesehatan Reproduksi Remaja	Persentase usia perkawinan perempuan Pasangan Usia Subur (PUS) kurang dari 20 tahun	%	10,42	11,42	0,97		10,8	94,57	▶	DissosPPPAKB
3	Pelayanan Kontrasepsi	DO KB	%	13	15	4,05		13,69	91,26	▶	DissosPPPAKB
		Unmet Need	%	8,5	9	27,9		13,59	151	●	DissosPPPAKB
4	Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Jumlah peserta KB Mandiri	%	92	90	67,17		70,1	77,88	▶	DissosPPPAKB
5	Promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	Jumlah Kelompok Bina Keluarga	kelompok BKB	651	641	561		515	80,34	▶	DissosPPPAKB
		BKR		296	286	248		216	75,52	▶	DissosPPPAKB

No	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RJMD	Target 2019	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2018	Realisasi Capaian RKPD TW I 2019	Realisasi Capaian RKPD TW II 2019	% Capaian RKPD s/d TW II Tahun 2019	Status Capaian Target	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			BKL	494	484	439		378	78,09	▶	DissosPPPAKB
			UPPKS	606	596	737		482	80,87	▶	DissosPPPAKB
6	Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga										
		Jumlah tenaga pendamping bina keluarga	kelompok BKB	651	641	561		515	80,34	▶	DissosPPPAKB
			BKR	296	286	248		216	75,52	▶	DissosPPPAKB
			BKL	494	484	439		378	78,09	▶	DissosPPPAKB
			UPPKS	606	596	737		482	80,87	▶	DissosPPPAKB
7	Pengendalian dan pengawasan pembinaan keluarga berencana dan keluarga sejahtera										
		Persentase keluarga Pra sejahtera dan KS I	%	25	30	40,41		28,1	93,66	▶	DissosPPPAKB
8	Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak										
		Persentase anggota kelompok BKB, BKL, dan BKR yang aktif mengikuti kegiatan	%	23	21	64,04		19	90,47	▶	DissosPPPAKB
9	Perencanaan dan Pemaduan kebijakan pengendalian penduduk										



No	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RJMD	Target 2019	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2018	Realisasi Capaian RKPD TW I 2019	Realisasi Capaian RKPD TW II 2019	% Capaian RKPD s/d TW II Tahun 2019	Status Capaian Target	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		penurunan laju pertumbuhan penduduk	%	0,95	1	0		0,97	97	►	DissosPPPAKB
10	Pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR										
		Peserta KB Mandiri	%	92	90	34,74		70,1	77,88	►	DissosPPPAKB
11	Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak										
		Prosentase anggota kelompok BKB, BKL dan BKR yang aktif mengikuti kegiatan	%	23	21	64,4		19	90,47	►	DissosPPPAKB
12	Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga										
		Tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Bkb	651	641			515	80,34	►	DissosPPPAKB
			BKR	296	286			216	75,52	►	DissosPPPAKB
			BKL	494	484			378	78,09	►	DissosPPPAKB
			UPPKS	606	596			482	80,87	►	DissosPPPAKB
13	Pengendalian dan Pengawasan Pembinaan										
		Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan KS I	%		30			28,01	93,66	►	DissosPPPAKB



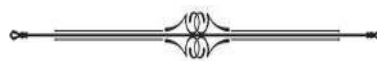
2.2.8. Perhubungan

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan urusan Perhubungan sampai dengan triwulan II Tahun 2019 sebagaimana Tabel 2.15.

Tabel 2.15
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perhubungan

No	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RJMD	Target 2019	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2018	Realisasi Capaian RKPD TW I 2019	Realisasi Capaian RKPD TW II 2019	% Capaian RKPD s/d TW II Tahun 2019	Status Capaian Target	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Peningkatan Pelayanan Angkutan										
		Rasio Ijin Trayek	kend / jiwa	0,00025	0,000229	0,00028	0,0002853	0,00314	1371,18	•	Dinas Perhubungan
		Rasio Panjang jalan Per Jumlah Kendaraan	km / kend	0,002251	0,002452	0,001192	0	0	0	▼	Dinas Perhubungan
		Jumlah orang / Barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	jiwa	1.434.574	1.394.353	1.245.310	102312	305.902	21,94	▼	Dinas Perhubungan
2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)										
		Jumlah pemeliharaan marka jalan	m2	3.630	700	0	0	0	0	▼	Dinas Perhubungan
		Jumlah pemeliharaan traffic light	unit	28	28	28	28	28	100	•	Dinas Perhubungan
		Jumlah pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas	buah	3.630	30	131	7	14	46,66	▼	Dinas Perhubungan

No	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RJMD	Target 2019	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2018	Realisasi Capaian RKPD TW I 2019	Realisasi Capaian RKPD TW II 2019	% Capaian RKPD s/d TW II Tahun 2019	Status Capaian Target	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas										
		Persentase pemasangan perlengkapan jalan	%	36	33,38	65,24	8	16	47,93	▼	Dinas Perhubungan
4	Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor										
		Jumlah kendaraan bermotor wajib uji	kendaraan	74.399	12.558	9.378	10.026	20.026	159,468	●	Dinas Perhubungan
		Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	87,84	87,84	84,03				▼	Dinas Perhubungan
		Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	menit	30	40	45	40	40	100	●	Dinas Perhubungan



2.2.9. Komunikasi dan Informatika

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informatika sampai dengan triwulan II Tahun 2019 sebagaimana Tabel 2.16.

Tabel 2.16
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika

No	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RJMD	Target 2019	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2018	Realisasi Capaian RKPd TW I 2019	Realisasi Capaian RKPd TW II 2019	% Capaian RKPd s/d TW II Tahun 2019	Status Capaian Target	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Komunikasi dan Informatika										
		Sistim Informasi Manajemen Pemda	buah	45	35	6	2	2	5,71	▼	Dinas Kominfo
		Jumlah Tower sellurer	unit	244	232	241	54	168	72,41	►	Dinas Kominfo
2	Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi										
		Web site milik pemerintah daerah	buah	476	276	43	0	0	0,00	▼	Dinas Kominfo
		Jumlah layanan informasi dan layanan masyarakat	layanan			128				▼	Dinas Kominfo
3	Kerjasama Informasi dengan Mass Media										
		Jumlah surat kabar nasional/lokal	buah	14	14	14	0	0	0,00	▼	Dinas Kominfo
		Jumlah penyiaran radio/TV lokal	stasiun	12	12	12	1	5	41,67	▼	Bagian Humas Setda
4	Intensifikasi penanganan pengaduan masyarakat										
		Prosentase penanganan pelayanan pengaduan masyarakat	%		100	99	0	0	0,00	▼	Dinas Kominfo
5	Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi										

No	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RJMD	Target 2019	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2018	Realisasi Capaian RKPD TW I 2019	Realisasi Capaian RKPD TW II 2019	% Capaian RKPD s/d TW II Tahun 2019	Status Capaian Target	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Komunikasi dan Informatika										
		Meningkatnya kemampuan SDM bidang IT	orang	50	10	3	0	0	0,00	▼	Dinas Kominfo

2.2.10. Koperasi dan UKM

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan urusan Koperasi dan UKM sampai dengan triwulan II Tahun 2019 sebagaimana Tabel 2.17.

Tabel 2.17
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Koperasi dan UKM

No	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RJMD	Target 2019	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2018	Realisasi Capaian RKPD TW I 2019	Realisasi Capaian RKPD TW II 2019	% Capaian RKPD s/d TW II Tahun 2019	Status Capaian Target	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah										
		Pertumbuhan UMKM	orang	55.141	55.066	55.016	-	55.010	99,9	►	Dinas Dagkop UKM
		Persentase UMKM yang memiliki keunggulan kompetitif	%	4	3,94	5,51	-	0,36	9,14	▼	Dinas Dagkop UKM
		Jumlah UMKM yang memiliki sertifikasi produk halal	UMKM	85	75	64	67	67	89,33	►	Dinas Dagkop UKM
2	Pengembangan Sistem Pendukung usaha bagi UMKM										

No	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RJMD	Target 2019	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2018	Realisasi Capaian RKPD TW I 2019	Realisasi Capaian RKPD TW II 2019	% Capaian RKPD s/d TW II Tahun 2019	Status Capaian Target	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah Promosi Produk unggulan daerah (pameran)	Promosi	38	6	7	1	3	50	▶	Dinas Dagkop UKM
3	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi										
		Persentase Koperasi Aktif	%	77,94	69,77	80,18	-	80,14	114,86	•	Dinas Dagkop UKM
		Pertumbuhan Koperasi	unit	1036	1006	888	883	886	88,07	▶	Dinas Dagkop UKM
		Jumlah Manager Koperasi bersertifikasi	orang	75	65	47	73	73	112,31	•	Dinas Dagkop UKM

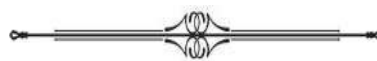
2.2.11. Penanaman Modal

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan urusan Penanaman Modal sampai dengan triwulan II Tahun 2019 sebagaimana Tabel 2.18.

Tabel 2.18
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal

No	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RJMD	Target 2019	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2018	Realisasi Capaian RKPD TW I 2019	Realisasi Capaian RKPD TW II 2019	% Capaian RKPD s/d TW II Tahun 2019	Status Capaian Target	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi										
		Jumlah investor berskala nasional PMDN	Perusahaan	25	25	52	26	26	0	•	DPMPSTSP
		Jumlah investor berskala nasional PMA	Perusahaan		5	23	9	9	0	•	DPMPSTSP

No	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RJMD	Target 2019	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2018	Realisasi Capaian RKPD TW I 2019	Realisasi Capaian RKPD TW II 2019	% Capaian RKPD s/d TW II Tahun 2019	Status Capaian Target	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah BUMD	BUMD	6	6	6		3	50	►	DPMPTSP
		Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN)	PMDN (dlm juta Rp.)	132.218	114.215	134.259	9857,6	9857,6	0	▼	DPMPTSP
		Jumlah nilai investasi berskala nasional PMA	PMA (US \$)	102.196.297	88.281.003	84.077.146	20,50 \$		0	▼	DPMPTSP
		Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan administrasi pemerintah	Jumlah	1	1	1			0	▼	DPMPTSP
2	Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi										
		Layanan perijinan	hari	14	14	14		0	0	▼	DPMPTSP
		Peninjauan lokasi perijinan	hari	14	14	14		0	0	▼	DPMPTSP



2.2.12. Pemuda dan Olahraga

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemuda dan Olahraga sampai dengan triwulan II Tahun 2019 sebagaimana Tabel 2.19.

Tabel 2.19
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga

No	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RJMD	Target 2019	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2018	Realisasi Capaian RKPD TW I 2019	Realisasi Capaian RKPD TW II 2019	% Capaian RKPD s/d TW II Tahun 2019	Status Capaian Target	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Peningkatan peran serta kepemudaan										
		Jumlah Kegiatan Kepemudaan	kegiatan	28	4	1				▼	Disparbudpora
2	Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda										
		Jumlah Organisasi Pemuda	OKP	26	26	26	26	29	112	●	Disparbudpora
3	Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga										
		Persentase Kecamatan yang mempunyai Sarana dan Gedung Olahraga yang Representatif	%	35	26	23	42	42	162	●	Disparbudpora
4	Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga										
		Jumlah Organisasi Olahraga	buah	35	35	35	35	35	100	●	Disparbudpora
		Persentase Cabang Olahraga yang menjalankan Kompetisi secara teratur	%	91,43	91,43	97	45	80	87	►	Disparbudpora

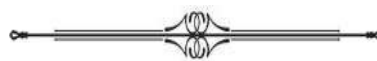
No	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RJMD	Target 2019	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2018	Realisasi Capaian RKPD TW I 2019	Realisasi Capaian RKPD TW II 2019	% Capaian RKPD s/d TW II Tahun 2019	Status Capaian Target	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Persentase Nomor Cabang Olahraga yang memperoleh Medali dalam Kompetisi Nasional	%	17,28	17,28	37,5	0	0	0	▼	Disparbudpora
5	Pembangunan dan Pengembangan Sarana Keolahragaan (Sport Center, GOR)										
		Sport center dan GOR	paket	35						▼	Disparbudpora

2.2.13. Statistik

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan urusan Statistik sampai dengan triwulan II Tahun 2019 sebagaimana Tabel 2.20.

Tabel 2.20
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Statistik

No	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RJMD	Target 2019	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2018	Realisasi Capaian RKPD TW I 2019	Realisasi Capaian RKPD TW II 2019	% Capaian RKPD s/d TW II Tahun 2019	Status Capaian Target	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pengembangan data/informasi/statistik daerah										
		dok. "Kabupaten Klaten Dalam Angka"	dok	5	1	1	0	0	0	▼	Dinas Kominfo



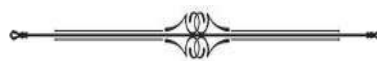
No	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RJMD	Target 2019	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2018	Realisasi Capaian RKPD TW I 2019	Realisasi Capaian RKPD TW II 2019	% Capaian RKPD s/d TW II Tahun 2019	Status Capaian Target	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kecamatan Dalam Angka	dok	5	1	1	0	0	0	▼	Dinas Kominfo
		Profil Daerah	dok	6	1	1	0	0	0	▼	Dinas Kominfo
		Pertumbuhan PDRB	%	5	5,38	5,44	0	0	0	▼	Dinas Kominfo
		Laju inflasi	%	4	4	2,14	0	0	0	▼	Dinas Kominfo
		PDRB per kapita	Rp	25.930.000	23.560.000	32.356.309	0	0	0	▼	Dinas Kominfo

2.2.14. Persandian

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan urusan Persandian sampai dengan triwulan II Tahun 2019 sebagaimana Tabel 2.21.

Tabel 2.21
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Persandian

No	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RJMD	Target 2019	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2018	Realisasi Capaian RKPD TW I 2019	Realisasi Capaian RKPD TW II 2019	% Capaian RKPD s/d TW II Tahun 2019	Status Capaian Target	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Peningkatan Kemampuan Perlindungan Masyarakat										
		Jumlah Komunitas Intelijen Daerah (Kominda)	orang	36		12		10 *)		▼	Kantor Kesbangpol

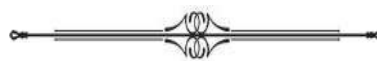


2.2.15. Kebudayaan

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan urusan Kebudayaan sampai dengan triwulan II Tahun 2019 sebagaimana Tabel 2.22.

Tabel 2.22
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan

No	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RJMD	Target 2019	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2018	Realisasi Capaian RKPD TW I 2019	Realisasi Capaian RKPD TW II 2019	% Capaian RKPD s/d TW II Tahun 2019	Status Capaian Target	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya										
		Jumlah kerjasama antar daerah	keg	32		30		0	0	▼	Disparbudpora
2	Pengelolaan Kekayaan Budaya										
		Jumlah Jenis Kesenian	jenis	39	39	34	34	34	87	►	Disparbudpora
		Pagelaran Seni dan Budaya Tradisional	kegiatan	78	13	8	2	4	31	▼	Disparbudpora
		Jumlah Gedung Kesenian	buah	1	1	1	1	1	100	●	Disparbudpora
3	Pengembangan Nilai Budaya										
		Pelestarian Budaya Daerah	kegiatan	24	4	8	2	4	100	●	Disparbudpora



2.2.16. Perpustakaan

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan urusan Perpustakaan sampai dengan triwulan II Tahun 2019 sebagaimana Tabel 2.23.

Tabel 2.23
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan

No	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RJMD	Target 2019	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2018	Realisasi Capaian RKPd TW I 2019	Realisasi Capaian RKPd TW II 2019	% Capaian RKPd s/d TW II Tahun 2019	Status Capaian Target	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan										
		Jumlah Pengunjung Perpustakaan	orang	66.173	10.000	67.553	2.792	37.796	378	●	Dinas Arpus
		Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan	eksemplar	44.561	150	675	225	675	450	●	Dinas Arpus

2.2.17. Kearsipan

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan urusan Kearsipan sampai dengan triwulan II Tahun 2019 sebagaimana Tabel 2.24.

Tabel 2.24
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kearsipan

No	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RJMD	Target 2019	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2018	Realisasi Capaian RKPd TW I 2019	Realisasi Capaian RKPd TW II 2019	% Capaian RKPd s/d TW II Tahun 2019	Status Capaian Target	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah										
		Jumlah Koleksi Arsip	arsip (berkas)	110.700	7.500	9.191	6.742	6.742	90	▶	Dinas Arpus

No	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RJMD	Target 2019	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2018	Realisasi Capaian RKPD TW I 2019	Realisasi Capaian RKPD TW II 2019	% Capaian RKPD s/d TW II Tahun 2019	Status Capaian Target	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah Pengunjung Arsip	orang	235	36	38	11	18	50	►	Dinas Arpus
		Jumlah Dokumen Arsip Inaktif								▼	Dinas Arpus
2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi										
		Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Pengelolaan Arsip Standar	desa/kelurahan	103	16	13	5	7	44	▼	Dinas Arpus

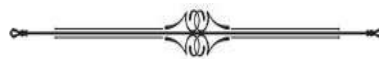
2.3. Urusan Pilihan

2.3.1. Kelautan dan Perikanan

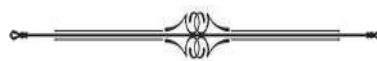
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan urusan Kelautan dan Perikanan sampai dengan triwulan II Tahun 2019 sebagaimana Tabel 2.25.

Tabel 2.25
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kelautan dan Perikanan

No	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RJMD	Target 2019	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2018	Realisasi Capaian RKPD TW I 2019	Realisasi Capaian RKPD TW II 2019	% Capaian RKPD s/d TW II Tahun 2019	Status Capaian Target	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pengembangan Budidaya Perikanan										
		Produksi ikan perikanan darat	ton	242.863	43.129	26.633,33	5081	9.767	22,65	▼	DPKPP



No	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RJMD	Target 2019	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2018	Realisasi Capaian RKPD TW I 2019	Realisasi Capaian RKPD TW II 2019	% Capaian RKPD s/d TW II Tahun 2019	Status Capaian Target	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Produksi benih ikan di Unit Perbenihan Rakyat (UPR)	juta ekor	755	127		22,4468	46,4706	36,59	▼	DPKPP
		Produksi benih ikan di UPT Unit Budidaya Ikan (UBI)	juta ekor	10	1,67	0,364	0,0248	0,0767	4,59	▼	DPKPP
		Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan)	jumlah pokdakan	316	308		266	266	86,36	►	DPKPP
2	Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan										
		Konsumsi ikan	kg/kapita /th	20,39	19,61	19,17	20,4	20,4	104,03	•	DPKPP
	Pengembangan Perikanan Tangkap										
		Cakupan Bina Kelompok Nelayan Tangkap	Kelompok Nelayan	14	9	6	6	6	66,67	►	DPKPP

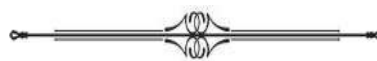


2.3.2. Pariwisata

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan urusan Pariwisata sampai dengan triwulan II Tahun 2019 sebagaimana Tabel 2.26.

Tabel 2.26
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pariwisata

No	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RJMD	Target 2019	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2018	Realisasi Capaian RKPD TW I 2019	Realisasi Capaian RKPD TW II 2019	% Capaian RKPD s/d TW II Tahun 2019	Status Capaian Target	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pengembangan Destinasi Pariwisata										
		Jumlah Kawasan Wisata Unggulan	kawasan wisata unggulan	2	2	1	1	1	50	►	Disparbudpora
		Jumlah Desa Wisata	desa wisata unggulan	1	1	1	16	16	1600	●	Disparbudpora
		Jumlah Obyek Wisata	OW	25	25	46				▼	Disparbudpora
2	Pengembangan Pemasaran Wisata										
		Kunjungan Wisata	orang	1.835.021	293.041	2.370.553	211.677	371.098	127	●	Disparbudpora
3	Pengembangan Kemitraan										
		Jumlah Homestay	homestay	20	20	82	66	66	330	●	Disparbudpora



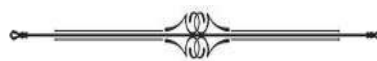
2.3.3. Pertanian

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan urusan Pertanian sampai dengan triwulan II Tahun 2019 sebagaimana tabel 2.27.

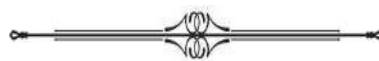
Tabel 2.27
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pertanian

No	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RJMD	Target 2019	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2018	Realisasi Capaian RKPD TW I 2019	Realisasi Capaian RKPD TW II 2019	% Capaian RKPD s/d TW II Tahun 2019	Status Capaian Target	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan)										
		Produktifitas padi	kwintal/ha	384	64	60	64,81	63,37	99,02	▶	DPKPP
		Produktifitas jagung	kwintal/ha	511	85,18	80,5	82,03	78,9	92,63	▶	DPKPP
		Produktifitas kedelai	kwintal/ha	134	22,26	20,4	17,8	17,32	77,81	▶	DPKPP
		Produksi padi GKG	Ton	2.555.810	426.032	442.120	207,495	405970	95,29	▶	DPKPP
		Produksi jagung	Ton	566.128	94.380	84.961	15,485	77.106	81,70	▶	DPKPP
		Produksi kedelai	Ton	36.365	6.065	6.080	37,3	5.426	89,46	▶	DPKPP
2	Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan										
		Produksi tembakau rajang	Ton	3.032	2.636	80,75	0	0	0,00	▼	DPKPP
		Produksi tembakau asepan	Ton	6.995	1.166	854,41	0	0	0,00	▼	DPKPP
		Produksi lada	Ton biji kering	58.549	9.771	-	3200	4900	50,15	▶	DPKPP
		Produksi cengkeh	Ton bunga kering	278	46,4	0,57	18,5	29	62,50	▶	DPKPP

No	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RJMD	Target 2019	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2018	Realisasi Capaian RKPD TW I 2019	Realisasi Capaian RKPD TW II 2019	% Capaian RKPD s/d TW II Tahun 2019	Status Capaian Target	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Peningkatan pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan										
		Promosi hasil produk pertanian dan olahan pangan	kali	2	2	2	1	2	100,00	●	DPKPP
4	Pencegahan dan penanggulangan penyakit Ternak										
		Rasio pelayanan kesehatan hewan terhadap total jumlah ternak (ruminansia dan unggas)	%	89	89	85	89	89	100,00	●	DPKPP
5	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan										
		Produksi telur ayam ras	Ton	55.521	9.456	6.100	1715	5332	56,39	▶	DPKPP
		Produksi telur ayam buras	Ton	8.662	1.471	1.449	584	1577	107,21	●	DPKPP
		Jumlah pemotongan ternak sapi di RPH	ekor	31.155	5.363	2.122	589	1274	23,76	▼	DPKPP
6	Peningkatan Produksi Hasil Peternakan										
		Jumlah populasi sapi potong	ekor	751.339	130.343	98.000	97.704	196.173	150,51	●	DPKPP



No	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RJMD	Target 2019	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2018	Realisasi Capaian RKPD TW I 2019	Realisasi Capaian RKPD TW II 2019	% Capaian RKPD s/d TW II Tahun 2019	Status Capaian Target	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah populasi sapi perah	ekor	41.990	7.191	6.200	5.870	11.721	163,00	●	DPKPP
		Jumlah populasi kambing	ekor	651.294	111.844	99.000	100.588	204.816	183,13	●	DPKPP
		Jumlah populasi ayam buras	ekor	9.590.015	1.628.570	2.216.779	1.380.528	3.390.921	208,21	●	DPKPP
		Jumlah populasi itik	ekor	2.039.687	349.323	413.542	363.318	702.661	201,15	●	DPKPP
		Produksi daging sapi potong	Kilogram	15.169.608	1.805.122	403.180	156.560	454.290	25,17	▼	DPKPP
		Produksi daging unggas	Kilogram	25.621.548	4.375.944	4.707.607	2.097.745	6.411.060	146,51	●	DPKPP
		Produksi susu sapi	liter	30.852.556	5.283.681	3.767.622	1.167.288	3.245.470	61,42	▶	DPKPP
7	Peningkatan Kesejahteraan Petani										
		Peningkatan kapasitas kelompok tani mandiri	Poktan	70	60	42	13	30	50,00	▶	DPKPP
8	Pemberdayaan penyuluhan pertanian/ Perkebunan Lapangan										
		Jumlah penyuluh yang berprestasi	Orang Penyuluh	9	9	6	3	6	66,67	▶	DPKPP
9	Pengembangan Kawasan Agropolitan										
		Jumlah kawasan	Kawasan	2	1	1	-	1	100,00	●	DPKPP

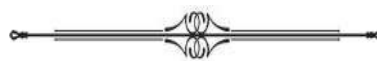


2.3.4. Kehutanan

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan urusan Kehutanan sampai dengan triwulan II Tahun 2019 sebagaimana Tabel 2.28.

Tabel 2.28
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kehutanan

No	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RJMD	Target 2019	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2018	Realisasi Capaian RKPD TW I 2019	Realisasi Capaian RKPD TW II 2019	% Capaian RKPD s/d TW II Tahun 2019	Status Capaian Target	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pemanfaatan potensi sumber daya hutan										
		Jumlah Penangkar burung	orang		325		258	258	79,38	►	DLHK
2	Rehabilitasi hutan dan lahan										
		Luasan hutan rakyat	ha	74.970	12.495				0	▼	DLHK
		Pemeliharaan penghijauan	ha	275	50				0	▼	DLHK

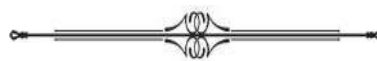


2.3.5. Energi dan Sumber Daya Mineral

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral sampai dengan triwulan II Tahun 2019 sebagaimana Tabel 2.29.

Tabel 2.29
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

No	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RJMD	Target 2019	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2018	Realisasi Capaian RKPD TW I 2019	Realisasi Capaian RKPD TW II 2019	% Capaian RKPD s/d TW II Tahun 2019	Status Capaian Target	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan										
		Rasio ketersediaan daya listrik	%	82	81,25					▼	DPU dan ESDM
		Rumah tangga pengguna listrik	KK	414.417	383.255					▼	
		Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	%	88	82,7					▼	
2	Pembinaan dan pengawasan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral										
		Luas lahan tambang yang berijin	ha	21.344	1.776,37					▼	Bag. Perekonomian Setda



2.3.6. Perdagangan

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan urusan Perdagangan sampai dengan triwulan II Tahun 2019 sebagaimana Tabel 2.30.

Tabel 2.30
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perdagangan

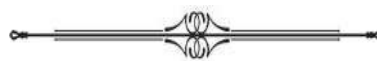
No	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RJMD	Target 2019	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2018	Realisasi Capaian RKPD TW I 2019	Realisasi Capaian RKPD TW II 2019	% Capaian RKPD s/d TW II Tahun 2019	Status Capaian Target	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan										
		Tingkat Inflansi tahunan (yoy)	%	4	4	2,7	1,25	2,19	54,74	►	Dinas Dagkop UKM
		Persentase produk barang dan jasa yang aman	%	100	95	100	-	60	63,16	►	Dinas Dagkop UKM
2	Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri										
		Jumlah Pasar yang di Revitalisasi	unit	167	2	3	0	0	0	▼	Dinas Dagkop UKM
		Rasio jumlah pasar terhadap total jumlah pedagang	%	0,72	0,72	0,84	0,84	0,84	116,67	●	Dinas Dagkop UKM
		Persentase pendapatan pasar terhadap PAD	%	1,59	1,56	1,31	2,19	1,07	68,59	►	Dinas Dagkop UKM
3	Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan										
		Persentase PKL dan asongan yang terdaftar	%	100	88,89	79,95	21,96	36,61	41,19	▼	Dinas Dagkop UKM

2.3.7. Perindustrian

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan urusan Perindustrian sampai dengan triwulan II Tahun 2019 sebagaimana Tabel 2.31.

Tabel 2.31
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perindustrian

o	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RJMD	Target 2019	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2018	Realisasi Capaian RKPd TW I 2019	Realisasi Capaian RKPd TW II 2019	% Capaian RKPd s/d TW II Tahun 2019	Status Capaian Target	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pengembangan industri kecil dan menengah										
		Jumlah industri Menengah dan Besar	unit usaha	132	132	133	0	134	101,52	●	Dinas Perinaker
		Jumlah Produk yang memakai ISO dan SNI	dokumen	73	65	63	0	66	101,54	●	Dinas Perinaker
2	Peningkatan kemampuan teknologi industri										
		Jumlah IKM yang memiliki Standar Produk Teknologi Manufaktur	unit usaha	82	76	73	0	77	101,32	●	Dinas Perinaker
		Jumlah IKM Mebel memiliki SVLK	pengrajin	431	331	275	0	276	83,38	▶	Dinas Perinaker
		Jumlah kegiatan Dekranasda / nas	kegiatan	30	5	5	0	1	20	▼	Bag. Perekonomian Setda

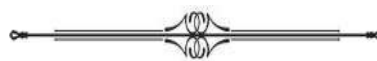


2.3.8. Transmigrasi

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan urusan Transmigrasi sampai dengan triwulan II Tahun 2019 sebagaimana Tabel 2.32.

Tabel 2.32
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Transmigrasi

No	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RJMD	Target 2019	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2018	Realisasi Capaian RKPd TW I 2019	Realisasi Capaian RKPd TW II 2019	% Capaian RKPd s/d TW II Tahun 2019	Status Capaian Target	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pengembangan wilayah transmigrasi	Transmigrasi swakarsa / UMUM	KK	170	30	7	0	0	0	▼	Dinas Perinaker
2	Transmigrasi lokal	Terselenggaranya transmigrasi bagi 100 KK	KK	100	20	150	0	150	750	●	Dinas Perinaker



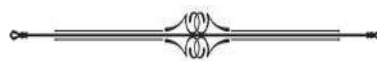
2.4. Urusan Penunjang

2.4.1. Perencanaan

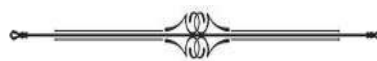
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan urusan Perencanaan sampai dengan triwulan II Tahun 2019 sebagaimana Tabel 2.33.

Tabel 2.33
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perencanaan

No	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RJMD	Target 2019	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2018	Realisasi Capaian RKPD TW I 2019	Realisasi Capaian RKPD TW II 2019	% Capaian RKPD s/d TW II Tahun 2019	Status Capaian Target	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Perencanaan Sosial dan Budaya										
		Persentase kemiskinan	%	6,73	8,97		0,75	2,15	24	▼	Bappeda
		Jumlah kemiskinan	jiwa	100.469	133,057		11.088	332.640	25	▼	Bappeda
		Jumlah kajian bidang sosial budaya	jumlah	22	4		0	0	0	▼	Bappeda
		Jumlah koordinasi kebijakan perencanaan bidang sosial budaya	jumlah	312	52		11	21	40	▼	Bappeda
2	Perencanaan Bidang Ekonomi										
		Jumlah kajian bidang ekonomi	jumlah	27	4		0	0	0	▼	Bappeda
		Jumlah koordinasi kebijakan perencanaan bidang ekonomi	jumlah	312	52		4	8	15,39	▼	Bappeda
		Pertumbuhan PDRB	%	5,38	5,38	5,44		0	0	▼	Bappeda
		Laju Inflasi	%	4	4	2,14	0,17	2,37	59,25	►	Bappeda
		PDRB Per kapita	Rp.	25.930.000	23.560.000	32.356.309		0	0	▼	Bappeda
3	Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam										



No	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RJMD	Target 2019	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2018	Realisasi Capaian RKPD TW I 2019	Realisasi Capaian RKPD TW II 2019	% Capaian RKPD s/d TW II Tahun 2019	Status Capaian Target	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah kajian bidang fisik dan prasarana	Jumlah	18	3		0	0	0	▼	Bappeda
		Jumlah koordinasi kebijakan bidang fisik dan prasarana	jumlah		12		12	24	200	•	Bappeda
4	Pendataan Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan										
		Penjabaran program RPJMD kedalam RKPD	%	96,25	95,75	83,5	95,75	95,75	100	•	Bappeda
5	Perencanaan Pembangunan Daerah										
		Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	dokumen	2	0	1	0	0	0	▼	Bappeda
		Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	dokumen	10	2	2	0	2	100	•	Bappeda

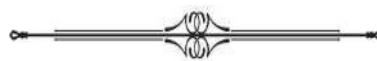


2.4.2. Keuangan

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan urusan Keuangan sampai dengan triwulan II Tahun 2019 sebagaimana Tabel 2.34.

Tabel 2.34
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Keuangan

No	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RJMD	Target 2019	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2018	Realisasi Capaian RKPD TW I 2019	Realisasi Capaian RKPD TW II 2019	% Capaian RKPD s/d TW II Tahun 2019	Status Capaian Target	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur										
		Sistim Informasi Manajemen Pemda (Keuangan)	Simda	6	6	100	6	6	100	•	BPKD
		Jumlah kendaraan dinas operasional	Roda 2	52	52	194	0	0	0	▼	BPKD
			Roda 4	34	0	100	0	0	0	▼	BPKD
2	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah										
		Rasio PAD terhadap total penerimaan APBD	%	8	7,76	200	9	9	115,97	•	BPKD
		Persentase kenaikan PAD	%	6,77	6,71	125	-0,18	-0,17	-2,52	▼	BPKD
		Rasio wajib pajak daerah terhadap jumlah penduduk	%	39	37,5	115	45	44	117,33	•	BPKD



2.4.3. Kepegawaian dan Diklat

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan urusan Kepegawaian sampai dengan triwulan II Tahun 2019 sebagaimana Tabel 2.35.

Tabel 2.35
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kepegawaian dan Diklat

No	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RJMD	Target 2019	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2018	Realisasi Capaian RKPD TW I 2019	Realisasi Capaian RKPD TW II 2019	% Capaian RKPD s/d TW II Tahun 2019	Status Capaian Target	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur										
		Jumlah PNS yang Diklat Kepemimpinan Tingkat II	orang	30	5		0	0	0	▼	BKPPD
		Jumlah PNS yang Diklat Kepemimpinan Tingkat III	orang	153	30	10	0	26	86,67	►	BKPPD
		Jumlah PNS yang Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	orang	402	120	40	0	15	12,5	▼	BKPPD
		Jumlah PNS yang berprestasi yang mendapatkan Satya Lancana	orang	260	12	197	0	0	0	▼	BKPPD
		Jumlah PNS yang mendapatkan Pembekalan yang akan pensiun	orang	1.740	300	40	0	30	10	▼	BKPPD
		Jumlah PNS yang Diklat Teknis Tugas dan fungsi	orang	340	60	326	0	42	70	►	BKPPD
		Jumlah PNS yang Diklat Fungsional	orang	455	80	262	18	25	31,25	▼	BKPPD
2	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur										
		Pemutakhiran data PNS yang Up Date	orang	13.000	13.000	18.813	1.406	3.932	30,25	▼	BKPPD
		Jumlah Kasus pelanggaran disiplin dan perceraian	orang	120	12	15	0	7	58,33	►	BKPPD

No	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RJMD	Target 2019	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2018	Realisasi Capaian RKPD TW I 2019	Realisasi Capaian RKPD TW II 2019	% Capaian RKPD s/d TW II Tahun 2019	Status Capaian Target	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah SK kenaikan pangkat PNS	orang	10.000	1.500	1.448	0	788	52,53	►	BKPPD

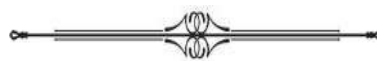
2.4.4. Fungsi Lainnya

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan urusan Fungsi Lainnya sampai dengan triwulan II Tahun 2019 sebagaimana Tabel 2.36.

Tabel 2.36
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Fungsi Lainnya

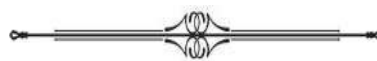
No	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RJMD	Target 2019	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2018	Realisasi Capaian RKPD TW I 2019	Realisasi Capaian RKPD TW II 2019	% Capaian RKPD s/d TW II Tahun 2019	Status Capaian Target	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penataan Peraturan Perundang-undangan										
		Jumlah Raperda	Raperda	130	22	25	8	10	45	▼	Bag. Hukum Setda
		Jumlah Perbup	Perbup	303	51	31	17	35	69	►	Bag. Hukum Setda
2	Penyuluhan dan Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM										
		Jumlah penanganan perkara	%	30	5	200	6	8	160	•	Bag. Hukum Setda
3	Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah										
		Penyediaan kebutuhan rumah tangga bupati/wk kepala daerah	Bahan Pokok	9	9	9	9	9	100	•	Bagian Umum Setda

No	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RJMD	Target 2019	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2018	Realisasi Capaian RKPD TW I 2019	Realisasi Capaian RKPD TW II 2019	% Capaian RKPD s/d TW II Tahun 2019	Status Capaian Target	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah pelaporan penyelenggaraan pemerintah daerah (Pelaporan Penyelenggaraan Pemda, ILPPD, dan LKPJ)	Jenis	3	369	3	0	0	0	▼	Bag. Pemerintahan Setda
4	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan desa/Kelurahan										
		Jumlah Perangkat Desa yang mengikuti Bintek/Pelatihan	orang	1.450	400	964	0	0	0	▼	Dinas Permasdes
5	Peningkatan Kerjasama antar daerah										
		Jumlah kesepakatan bersama	dokumen	12	2	16	1	4	200	●	Bag. Pemerintahan Setda
		Jumlah perjanjian kerjasama	dokumen	18	3	14	31	10	333	●	Bag. Pemerintahan Setda
6	Penataan penguasaan, Pemilikan, penggunaan dan Pemanfaatan tanah										
		Jumlah inventarisasi tanah kas desa se-Kabupaten Klaten	dokumen	391	70	70	0	70	100	●	Dinas Permasdes
7	Peningkatan tata kelola Pemerintahan Desa										
		Jumlah Desa yang dimonev se-Kabupaten Klaten	Desa	391	391	391	391	391	100	●	Dinas Permasdes
8	Penyelesaian konflik-konflik pertanahan										
		Penyelesaian permasalahan tanah kas desa	kasus	90	14	1	22	22	157,14	●	Dinas Permasdes

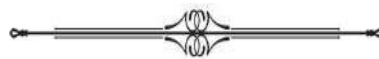


No	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RJMD	Target 2019	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2018	Realisasi Capaian RKPD TW I 2019	Realisasi Capaian RKPD TW II 2019	% Capaian RKPD s/d TW II Tahun 2019	Status Capaian Target	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa										
		Monitoring penyelenggaraan pemerintahan desa	desa	391	391	391	391	391	100	●	Dinas Permasdes
10	Pengembangan Wilayah Perbatasan										
		Monitoring pemeliharaan dan pemasangan pilar batas antar kabupaten	pilar batas	10	10	50	10	20	200	●	Bag. Pemerintahan Setda
11	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan tata laksana perangkat daerah										
		Jumlah organisasi perangkat daerah dan LSN yang telah dibentuk	Perangkat daerah dan LSN	47	4	1	2	2	50	▶	Bag. Organisasi Setda
		Jumlah organisasi perangkat daerah dan LSN yang telah dievaluasi	Perangkat daerah dan LSN	85	15	40	3	6	40	▼	Bag. Organisasi Setda
		Jumlah SKPD yang telah menetapkan standar prosedur dan pelayanan	SKPD	60	10	5	2	5	50	▶	Bag. Organisasi Setda
		Jumlah laporan kinerja instansi pemerintah (LKjiP, SKM, SPM, SP, dan SOP)	Jenis	5	5	1	1	1	20	▼	Bag. Organisasi Setda
12	Pembinaan dan pengembangan aparatur										
		Jumlah Anjab dan ABK SKPD	dokumen	213	30	40	15	30	100	●	Bag. Organisasi Setda
13	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur										
		Jumlah dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi	dokumen	12	2	1	0	0	0	▼	Bag. Organisasi Setda

No	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RJMD	Target 2019	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2018	Realisasi Capaian RKPD TW I 2019	Realisasi Capaian RKPD TW II 2019	% Capaian RKPD s/d TW II Tahun 2019	Status Capaian Target	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Cakupan peningkatan dan pengembangan budaya kerja	dokumen	495	85		0	0	0	▼	Bag. Organisasi Setda
		Cakupan peningkatan pengelolaan aparatur Setda	%	95	95	100	30	50	52,63%	►	Bag. Organisasi Setda
		Jumlah dokumen standar kompetensi teknis	dokumen	183	30		0	0	0	▼	Bag. Organisasi Setda
		Jumlah dokumen standar kompetensi manajerial	dokumen	153	30		0	0	0	▼	Bag. Organisasi Setda
14	Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan										
		Persentase penyerapan anggaran kegiatan SKPD Kabupaten	%	87,5	87,3	51		28	32,07	▼	Bag. Pembangunan Setda
		Persentase capaian pelaksanaan kegiatan SKPD Kabupaten	%	94,5	94,3	84		48	50,9	►	Bag. Pembangunan Setda
15	Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah										
		Jumlah Produk Legislasi DPRD	Raperda	130	20	28	4	8	40	▼	Sekretariat Dewan
		Jumlah Produk Pengawasan DPRD	Produk Pengawasan	30	4	4	1	2	50	►	Sekretariat Dewan
		Jumlah Produk Penganggaran yang dihasilkan	MOU PERDA	12	2	2	0	0	0	▼	Sekretariat Dewan
16	Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan										
		Jumlah pemeriksaan program tahunan	Obrik	2.592	432	312	240	439	101,62	●	Inspektorat



No	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RJMD	Target 2019	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2018	Realisasi Capaian RKPD TW I 2019	Realisasi Capaian RKPD TW II 2019	% Capaian RKPD s/d TW II Tahun 2019	Status Capaian Target	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH										
		Jumlah pemeriksaan reguler	Obrik	2.592	432	227	120	249	57,46	►	Inspektorat
		Jumlah pemeriksaan kasus khusus	Obrik	264	40	71	51	91	227,5	▼	Inspektorat
		Reviu laporan keuangan LKD dan SKPD, RKA/LKjIP, Pengadaan barang dan jasa, dana desa , Reviu RKPD dan Reviu RPJMD	Laporan	36	6	56	36	99	1.650	●	Inspektorat
18	Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan										
		Jumlah aparatur pengawas daerah yang telah mengikuti Diklat yang dipersyaratkan	orang	263	45	30	12	21	46,67	▼	Inspektorat
		Jumlah pelatihan kantor sendiri	kegiatan	252	42	59	6	24	57,14	►	Inspektorat
		Jumlah aparatur pengawas yang sudah dinilai angka kreditnya	orang	38	31	28	13	25	65,79	►	Inspektorat
19	Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Kelurahan										
		Jumlah kelurahan	kelurahan	10	10	10	10	10	100	●	Kelurahan



BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. KERANGKA EKONOMI DAERAH

Kondisi perekonomian Kabupaten Klaten Tahun 2019 sangat dipengaruhi oleh tantangan tekanan inflasi yang dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah dan kondisi perekonomian nasional yang merupakan dampak dari dinamika perkembangan perekonomian global akibat tekanan nilai dolar US\$ terhadap Rupiah. Perekonomian Kabupaten Klaten Tahun 2019 diharapkan akan tetap tumbuh dan meningkat dengan adanya dukungan-dukungan kebijakan yang mampu meningkatkan pertumbuhannya, antara lain: kebijakan pembangunan infrastruktur, peningkatan sektor-sektor yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi, terkendalinya inflasi, maupun dukungan regulasi yang kondusif dalam rangka penciptaan dan peningkatan iklim investasi daerah.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten dari tahun ke tahun menunjukkan trend yang positif, hal ini didukung dengan masih terjaganya tingkat konsumsi masyarakat yang tercermin dari daya beli yang membaik serta pertumbuhan sektor-sektor lapangan usaha yang baik. Target pada tahun 2018, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten mengalami peningkatan menjadi 5,44% dibanding tahun 2017 yang sebesar 5,07%. Untuk tahun 2019 diproyeksikan tumbuh pada kisaran 5,4 – 5,5% didukung dengan berkembangnya semua sektor lapangan usaha maupun pola masyarakat yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Perbandingan pertumbuhan ekonomi dalam 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional kurun waktu 2015-2017 dan Asumsi Tahun 2018

No	Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)		
		Nasional	Jawa Tengah	Kabupaten Klaten
1	2015	4,88	5,47	5,30
2	2016	5,02	5,28	5,14
3	2017	5,07	5,27	5,07
4	2018 *)	5,2 – 5,6	5,9 – 6,2	5,4-5,5

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018

*) Asumsi tahun 2018, data diolah Bappeda Kab. Klaten

Kinerja perekonomian daerah dilihat dari seberapa besar nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan produksi yang dihasilkan oleh suatu masyarakat dalam kurun waktu satu tahun yang berada dalam regional tertentu.

Secara keseluruhan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Klaten atas Dasar Harga Konstan 2010 selama 4 (empat) tahun terakhir (2015-2018) tumbuh secara positif. Gambaran selengkapnya Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010, di Kabupaten Klaten selama Tahun 2015-2018 dapat dilihat dapat dilihat pada Tabel 3.2.



Tabel 3.2
Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010
di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2018 (dalam Rp. Juta)

No	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018*)
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010		22,558,976.13	23,717,931.01	24.920.302,86	26,275,321.44
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,732,275.47	2,814,072.17	2.845.097,06	2,883,211.50
B	Pertambangan dan Penggalian	617,439.64	635,253.28	661.866,20	690,599.20
C	Industri Pengolahan	7,540,801.78	8,001,139.74	8.484.614,05	9,032,267.30
D	Pengadaan Listrik, Gas	39,160.62	41,588.12	44.249,82	47,202.20
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11,793.17	12,047.34	12.726,81	13,478.24
F	Konstruksi	1,356,317.55	1,435,985.49	1.528.175,76	1,629,914.60
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,209,074.39	4,358,461.18	4.519.078,43	4,699,213.20
H	Transportasi dan Pergudangan	544,592.24	566,772.32	597.101,45	631,381.60
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	832,820.90	883,280.17	944.307,06	1,013,542.00
J	Informasi dan Komunikasi	844,708.79	908,151.37	1.003.507,26	1,113,258.00
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	767,642.41	823,297.85	859.687,64	898,137.00
L	Real Estate	339,893.73	360,869.45	382.124,67	405,455.00
M, N	Jasa Perusahaan	70,961.66	77,484.45	83.334,52	89,961.00
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	574,874.57	591,863.52	610.862,34	631,158.40
P	Jasa Pendidikan	1,438,627.68	1,519,264.74	1.598.874,21	1,688,534.00
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	241,260.27	260,076.42	280.778,51	303,682.20
R,S,T	Jasa Lainnya	396,731.26	428,323.40	463.917,08	504,325.40

Sumber: BPS Kabupaten Klaten 2018

**) Asumsi tahun 2018, data diolah Bappeda Kab. Klaten*

Sementara itu, nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Klaten Atas Dasar Harga Berlaku dari tahun ke tahun cenderung mengalami kenaikan, jабaran pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2015-2018 dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3.
Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2018 (dalam Rp. Juta)

No	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018*)
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010		28,988,778.55	31,558,691.07	34,190,856.31	37,902,536.68
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,622,347.95	3,807,648.99	3,888,677.97	4,206,252.00
B	Pertambangan dan Penggalian	955,364.63	1,013,913.84	1,090,844.57	1,251,575.40
C	Industri Pengolahan	10,178,503.39	11,342,482.65	12,412,507.52	14,080,982.00
D	Pengadaan Listrik, Gas	39,661.13	45,832.98	52,851.96	57,168.80
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12,698.33	13,246.78	14,143.63	14,934.58
F	Konstruksi	1,780,130.61	1,914,709.83	2,090,001.40	2,307,153.80
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,947,444.05	5,290,031.30	5,686,966.56	6,048,164.80
H	Transportasi dan Pergudangan	614,745.60	645,983.06	730,496.14	810,468.50
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	974,845.99	1,091,004.92	1,190,467.24	1,298,448.50



No	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018*)
J	Informasi dan Komunikasi	880,528.28	948,513.65	1,094,538.75	1,163,021.70
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	985,803.41	1,084,247.12	1,180,028.20	1,312,773.50
L	Real Estate	381,078.74	409,138.03	444,110.49	493,620.60
M, N	Jasa Perusahaan	90,459.78	102,385.38	114,288.85	133,065.00
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	730,951.96	790,819.46	842,976.28	910,240.00
P	Jasa Pendidikan	1,984,205.50	2,159,132.68	2,366,343.26	2,685,456.10
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	339,329.96	371,819.69	411,170.96	472,641.00
R,S,T	Jasa Lainnya	470,679.24	527,780.71	580,442.53	656,570.40

Sumber: BPS Kabupaten Klaten 2018

*) Asumsi tahun 2018, data diolah Bappeda Kab. Klaten

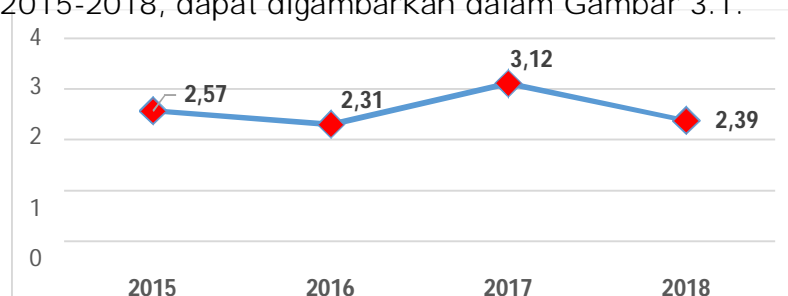
Selain dari PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, potret keberhasilan pembangunan ekonomi juga diukur melalui PDRB per kapita masyarakatnya. PDRB per kapita Kabupaten Klaten dari tahun ke tahun menunjukkan kinerja yang cenderung positif. Jabaran selengkapnya perkembangan PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir (2015-2018) disajikan dalam tabel 3.4.

Tabel 3.4.
Pertumbuhan PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2018

No	Tahun	PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (Rp)
1	2015	25.016.313,11
2	2016	27.129.645,40
3	2017	29.288.014,09
4	2018*	32.356.309,30

*) Asumsi tahun 2018, data diolah Bappeda Kab. Klaten

Indikator lain yang digunakan untuk menggambarkan kondisi ekonomi daerah adalah Laju Inflasi. Inflasi Kabupaten Klaten tahun 2017 tercatat 3,12% atau mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2016 yang sebesar 2,31%. Secara makro inflasi di Kabupaten Klaten dari kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir (2015-2018) mengalami fluktuasi. Fluktuasi ini disebabkan oleh adanya beberapa faktor seperti tidak stabilnya harga komoditas pangan dan harga BBM. Laju Inflasi Kabupaten Klaten Tahun 2015-2018, dapat digambarkan dalam Gambar 3.1.



Gambar 3.1.
Laju Inflasi Kabupaten Klaten Tahun 2015-2018



Di tahun 2018, laju inflasi Kabupaten sebesar 2,39%, artinya bahwa ketersediaan pasokan terpenuhi oleh produktivitas pertanian secara luas di Kabupaten Klaten, kelancaran distribusi, informasi harga maupun perubahan harga untuk bahan-bahan kebutuhan pokok di Kabupaten Klaten dapat terkendali serta kondusif serta tidak terlepas dari peran serta dari Tim Pengendali Inflasi Daerah maupun atas kerjasama dengan daerah sekitar baik untuk informasi harga maupun dengan adanya infrastruktur perdagangan yang memadai.

Kondisi perekonomian Kabupaten Klaten Tahun 2019 tidak lepas dari faktor-faktor yang berasal dari internal maupun eksternal dari perkembangan makro kondisi ekonomi Nasional maupun Provinsi. Mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, tantangan perekonomian yang akan dihadapi di tahun 2019 antara lain:

1. Potensi kenaikan inflasi yang berasal dari faktor kenaikan harga beberapa komoditas pangan utama, tarif daya listrik dan harga BBM;
2. Kualitas dan pertumbuhan ekonomi yang melambat;
3. Kondisi infrastruktur yang belum maksimal di beberapa lokasi dan potensi bencana mengganggu distribusi barang dan jasa. Untuk itu peningkatan infrastruktur Kabupaten Klaten merupakan prioritas untuk mendukung perekonomian lokal;
4. Jumlah penduduk yang besar dengan komposisi usia produktif yang semakin meningkat dibandingkan usia non produktif yang merupakan tantangan penyediaan lapangan pekerjaan mengingat kondisi demografi merupakan peluang untuk pengembangan perekonomian sekaligus tantangan dalam penyediaan sarana prasarana dasar masyarakat yang memadai secara kualitas dan kuantitas;
5. Tingkat kemandirian daerah yang tercermin dari penerimaan pendapatan daerah masih bergantung pada Pemerintah Pusat dan Provinsi;
6. Optimalisasi pengelolaan potensi lokal di bidang pertanian dalam arti luas, perdagangan, pengembangan UMKM dan Koperasi serta bidang kepariwisataan.

Selain tantangan tersebut, beberapa hal yang diharapkan dapat mendukung prospek perekonomian Kabupaten Klaten di tahun 2019, antara lain :

- ❖ Peluang pengembangan pasar pasca berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA);
- ❖ Potensi daerah diprediksikan semakin berkembang, mengingat letak Kabupaten Klaten yang strategis;
- ❖ Memacu pembangunan infrastruktur yang mendukung akses-akses sektor pariwisata, perdagangan dan UMKM yang diharapkan mampu mendukung kondisi perekonomian daerah.
- ❖ Meningkatkan sarana prasarana utilitas umum yang mampu menjadi daya tarik bagi calon investor dan dunia usaha;



- ❖ Menciptakan iklim usaha yang baik bagi dunia usaha melalui pengaturan dan kebijakan yang mampu memberikan kemudahan bagi dunia usaha yang tetap mempertimbangkan aspek dampak lingkungan;
- ❖ Meningkatkan kualitas dan inovasi produk-produk barang/jasa yang mampu bersaing dipasar global serta membuka akses pemasaran produk.

Dengan mempertimbangkan tantangan dan daya dukung yang ada, maka prospek perekonomian Kabupaten Klaten diharapkan mampu tumbuh secara positif dan berkualitas yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, kondusivitas perekonomian daerah, maupun peningkatan investasi daerah.

3.2. KERANGKA KEUANGAN DAERAH

Efektifitas penyelenggaraan pemerintahan tidak terlepas dari kapasitas keuangan yang dikelola. Kebijakan belanja dalam rangka pembangunan daerah dirumuskan dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal yang dimiliki. Besaran kapasitas fiskal tersebut sangat menentukan ketercapaian target sasaran makro pembangunan daerah. Kapasitas fiskal daerah tercermin dalam postur APBD yang terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

Kerangka keuangan daerah yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2019 perlu dilakukan penyesuaian dikarenakan beberapa asumsi yang digunakan pada saat penyusunan RKPD Tahun 2019 tidak sejalan dengan dinamika yang terjadi pada tahun 2019. Penyesuaian beberapa asumsi tersebut dampak dari kondisi keuangan daerah yang dipengaruhi dari kebijakan pemerintah pusat, provinsi maupun realisasi keuangan tahun sebelumnya (2018).

3.2.1. Kerangka Pendapatan Daerah

Kerangka pendapatan daerah perlu dilakukan perubahan asumsi, mendasari kerangka pendapatan daerah dipengaruhi pula oleh sumber-sumber pendapatan daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Secara makro, pendapatan daerah diasumsikan mengalami penurunan dari asumsi sebelumnya. Untuk pos Pendapatan Asli Daerah, diproyeksikan mengalami kenaikan dari asumsi sebelumnya. Hal ini merupakan bentuk upaya Pemerintah Kabupaten Klaten dalam rangka meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Pos Pendapatan Asli Daerah yang diasumsikan mengalami kenaikan adalah penerimaan Pajak Daerah dan Hasil Restribusi Daerah. Upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah antara lain :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat/wajib pajak;
- b. melakukan pendataan dan identifikasi sumber-sumber pendapatan pajak dan restribusi daerah;



- c. melakukan penyesuaian tarif pajak, redistribusi, dan dasar pengenaan pajak dengan peninjauan dan perubahan terhadap Peraturan Daerah tentang tarif pajak dan redistribusi yang sudah tidak relevan; serta
- d. meningkatkan iklim investasi daerah yang kondusif.

Sedangkan, penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan, perlu dilakukan penyesuaian mengingat beberapa asumsi yang telah ditetapkan tidak sesuai dengan kondisi yang ada. Pos dana perimbangan merupakan pos pendapatan yang masih mendominasi postur pendapatan daerah yang bersumber dari Pemerintah Pusat yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Pendapatan dana perimbangan dipengaruhi kebijakan pemerintah pusat. Kemudian, untuk pos Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah juga diasumsikan terjadi penurunan dari asumsi sebelumnya mengingat hal ini juga dipengaruhi kebijakan Pemerintah Provinsi dan juga kebijakan Pemerintah Pusat.

Secara lengkap, gambaran kerangka pendapatan daerah dan asumsi perubahannya tersaji dalam tabel 3.5.

Tabel 3.5.
Realisasi dan Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah
Pada RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2017-2019

Kode	Uraian	Realisasi		Proyeksi 2019	
		2017	2018*)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	PENDAPATAN	2.581.515.295.917	2.577.944.813.955	2.775.816.775.000	2.701.344.235.500
1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	371.718.439.306	395.867.927.955	395.168.514.000	279.470.225.500
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	105.290.677.595	115.771.908.527	115.325.000.000	124.075.000.000
1.1.2	Hasil Restribusi Daerah	12.668.781.932	13.014.667.474	13.652.447.000	14.152.447.000
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.742.870.570	22.811.147.630	17.082.855.000	17.082.855.000
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	244.016.109.209	244.270.205.324	249.108.212.000	124.159.923.500
1.2	Dana Perimbangan	1.624.715.625.119	1.652.127.767.661	1.792.676.497.000	1.748.660.129.000
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	50.852.354.977	41.131.449.124	47.289.153.000	41.911.953.000
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.271.590.067.902	1.237.967.327.000	1.268.916.510.000	1.303.659.728.000
1.2.3	Dana Transfer Khusus	302.273.202.240	373.028.991.537	476.470.834.000	403.088.448.000
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	585.081.231.492	529.949.118.339	587.971.764.000	673.213.881.000
1.3.1	Pendapatan Hibah	942.739.891	22.157.277.976	2.250.000.000	108.267.000.000
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	171.067.103.920	175.902.080.227	152.560.887.000	152.560.887.000
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	55.646.870.000	-	-	-



Kode	Uraian	Realisasi		Proyeksi 2019	
		2017	2018*)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	46.337.071.481	10.209.544.000	112.220.284.000	37.725.000.000
1.3.6	Pendapatan Lainnya	-	739.623.136	-	374.660.994.000
1.3.7	Dana Desa	311.087.446.200	320.940.593	320.940.593.000	-

Sumber : BPKD, Bappeda Kab. Klaten, 2019

*) An-Audited

3.2.2. Kerangka Belanja Daerah

Belanja daerah dialokasikan mendasari asumsi dasar ekonomi makro, kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kebutuhan pembangunan daerah dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditentukan. Perubahan belanja daerah pada RKPD Tahun 2019 perlu dilakukan, karena dampak dari kebijakan penerimaan pendapatan daerah yang harus disikapi dengan perubahan belanja daerah, kebijakan pemerintah pusat yang berpengaruh pada pos belanja daerah, mengakomodir belanja yang bersifat menangani dinamika permasalahan pembangunan daerah, serta belanja program kegiatan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) yang wajib dilaksanakan. Belanja daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, yang diarahkan pada :

- a. Memenuhi belanja yang bersifat wajib dan mengikat sesuai amanat ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka menjamin pelayanan dasar masyarakat;
- b. Memenuhi belanja prioritas pencapaian Visi dan Misi RPJMD 2016-2021, serta target sasaran makro tahunan yang telah ditetapkan;
- c. Memenuhi pelaksanaan program prioritas daerah dan program urusan penyelenggaraan pemerintahan yang harus dilaksanakan, dengan rumusan sub prioritas program antara lain :
 - ✓ Percepatan penanggulangan/penurunan angka kemiskinan;
 - ✓ Percepatan pengurangan tingkat pengangguran;
 - ✓ Percepatan pembangunan infrastruktur daerah;
 - ✓ Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur daerah termasuk perangkat desa;
 - ✓ Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar/publik dari sektor pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik yang memang menjadi kebutuhan masyarakat;
 - ✓ Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana utilitas umum;
 - ✓ Peningkatan tata kelola pemerintahan melalui penerapan teknologi informatika; dan



- ✓ Optimalisasi pengelolaan potensi kebudayaan, pertanian, pariwisata, pertanian, perindustrian dan perdagangan dalam rangka mendukung perekonomian daerah.

Secara makro, proyeksi perubahan belanja daerah pada RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2019 sebagaimana disajikan pada tabel 3.6.

Tabel 3.6.
Proyeksi Perubahan Belanja Daerah
Pada RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2019

Kode	Uraian	Proyeksi 2019*)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
2	BELANJA	2.960.816.775.000	3.078.722.603.633
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.557.893.663.000	2.068.804.192.404
2.1.1	Belanja Pegawai	1.058.370.564.000	1.236.448.661.104
2.1.3	Subsidi	-	2.000.000.000
2.1.4	Belanja Hibah	24.943.283.000	48.476.850.000
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.485.200.000	7.556.000.000
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	12.897.745.000	13.832.091.800
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	456.196.871.000	753.340.589.500
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000	7.150.000.000
2.2	Belanja Langsung	1.402.923.112.000	1.009.918.411.229

Sumber : BPKD, Bappeda Kab. Klaten, 2019

3.2.3. Kerangka Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan pos dalam struktur APBD yang berfungsi menutup *defisit* anggaran atau sebagai pos cadangan yang dimanfaatkan sebagai surplus anggaran. Perubahan kerangka pembiayaan daerah pada RKPD Tahun 2019 disusun mendasari realisasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018. Kebijakan perubahan pembiayaan daerah tersebut, diarahkan pada :

- Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) yang difokuskan untuk menutup defisit anggaran yang terjadi dengan mempertimbangkan komponen penggunaan diprioritaskan untuk kegiatan lanjutan dan utang pihak ketiga yang belum diselesaikan serta mengalokasikan ke dalam program prioritas pembangunan daerah yang mendukung pencapaian sasaran makro pembangunan tahunan.
- Melakukan terobosan pembiayaan keuangan daerah dengan mempertimbangkan adanya obligasi daerah, saham dan SBI, yang didukung dengan kemampuan SDM pengelola dan regulasi pemerintah.



- c. Optimalisasi pemberdayaan aset-aset daerah sebagai sumber pembiayaan daerah.
- d. Pembentukan dana cadangan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- e. Pengeluaran pembiayaan terkait penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban daerah mempedomani prinsip kehati-hatian (*prudential*) dan pengelolaannya berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal;

Selengkapnya, asumsi perubahan pembiayaan daerah pada RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2019, dapat dilihat pada tabel 3.7.

Tabel 3.7.
Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah
Pada RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2019

Kode	Uraian	Proyeksi 2019	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
3	PEMBIAYAAN		
3.1	Penerimaan Pembiayaan	200.000.000.000	395.378.368.133
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	200.000.000.000	395.378.368.133
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	15.000.000.000	18.000.000.000
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	10.000.000.000	10.000.000.000
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.000.000.000	8.000.000.000
	PEMBIAYAAN NETTO	185.000.000.000	377.378.368.133

Sumber : BPKD, Bappeda Kab. Klaten, 2019

Secara keseluruhan, perubahan kerangka keuangan daerah pada RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2019 dapat disajikan dalam tabel 3.8.

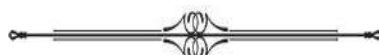
Tabel 3.8.
Proyeksi Perubahan Kerangka Keuangan Daerah
Pada RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2019

Kode	Uraian	Proyeksi 2019	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	PENDAPATAN	2.775.816.775.000	2.701.344.235.500
1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	395.168.514.000	279.470.225.500
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	115.325.000.000	124.075.000.000
1.1.2	Hasil Restribusi Daerah	13.652.447.000	14.152.447.000
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.082.855.000	17.082.855.000
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	249.108.212.000	124.159.923.500
1.2	Dana Perimbangan	1.792.676.497.000	1.748.660.129.000
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	47.289.153.000	41.911.953.000
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.268.916.510.000	1.303.659.728.000
1.2.3	Dana Transfer Khusus	476.470.834.000	403.088.448.000



Kode	Uraian	Proyeksi 2019	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	587.971.764.000	673.213.881.000
1.3.1	Pendapatan Hibah	2.250.000.000	108.267.000.000
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	152.560.887.000	152.560.887.000
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	-
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	112.220.284.000	37.725.000.000
1.3.7	Pendapatan Lainnya	-	374.660.994.000
1.3.8	Dana Desa	320.940.593.000	-
2	BELANJA	2.960.816.775.000	3.078.722.603.633
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.557.893.663.000	2.068.804.192.404
2.1.1	Belanja Pegawai	1.058.370.564.000	1.236.448.661.104
2.1.3	Subsidi	-	2.000.000.000
2.1.4	Belanja Hibah	24.943.283.000	48.476.850.000
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.485.200.000	7.556.000.000
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	12.897.745.000	13.257.091.800
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	456.196.871.000	753.340.589.500
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000	7.150.000.000
2.2	Belanja Langsung	1.402.923.112.000	982.125.755.229
SURPLUS / (DEFISIT)		(185.000.000.000)	(377.378.368.133)
3	PEMBIAYAAN		
3.1	Penerimaan Pembiayaan	200.000.000.000	395.378.368.133
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	200.000.000.000	395.378.368.133
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	18.000.000.000	18.000.000.000
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	10.000.000.000	10.000.000.000
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	8.000.000.000	8.000.000.000
	PEMBIAYAAN NETTO	185.000.000.000	377.378.368.133

Sumber : BPKD, Bappeda Kab. Klaten, 2019



BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2019 merupakan penjabaran dari tahun ke-3 (tiga) dari pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021, dan juga mempedomani arah kebijakan pembangunan jangka menengah pusat sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2015-2019, pembangunan jangka menengah provinsi sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

4.1. SASARAN PEMBANGUNAN

4.1.1. Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2019

Sasaran pembangunan nasional Tahun 2019 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 yang merupakan penjabaran tahun ke 5 (lima) atau tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 dalam pencapaian Visi Pembangunan Nasional "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong" yang diwujudkan melalui 7 (tujuh) Misi Pembangunan, yaitu :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.



Dalam rangka melaksanakan misi pembangunan nasional tersebut, dirumuskan kedalam 9 (sembilan) Agenda Prioritas Nawacita, yaitu :

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh Warga Negara;
2. Membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa; dan
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.

Selanjutnya dalam rangka mengimplementasikan Misi dan strategi pembangunan yang tertuang dalam 9 (sembilan) Agenda Prioritas Nawacita, Pembangunan Nasional Tahun 2019 ditetapkan dengan tema "*Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas*" yang ditempuh melalui strategi pembangunan yang dituangkan kedalam pendekatan 3 dimensi pembangunan, antara lain (1) Dimensi Pembangunan Manusia; (2) Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan; dan (3) Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan yang didukung oleh kondisi kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi, serta tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019, disusun dengan pendekatan perencanaan dan penganggaran yang tematik, holistik, integratif dan spasial (THIS), serta melalui kebijakan *Money Follow Program* yaitu :

- Tematik : tema-tema yang menjadi prioritas dalam suatu jangka waktu tertentu;
- Holistik : penjabaran tematik dari program Presiden ke dalam perencanaan dan penganggaran yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir dalam suatu rangkaian kegiatan;
- Integratif : upaya keterpaduan pelaksanaan perencanaan program Presiden yang dilihat dari peran Kementerian/Lembaga/Daerah/Pemangku kepentingan lainnya dan upaya keterpaduan dari berbagai sumber pembiayaan; dan



- Spasial : kegiatan pembangunan yang direncanakan secara fungsional lokasinya harus berkaitan satu dengan lain dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antarwilayah.

Sebagaimana Visi, Misi, Agenda Prioritas Nawacita, Strategi Pembangunan Nasional dengan pendekatan perencanaan dan penganggaran tersebut, ditetapkan sasaran pembangunan nasional Tahun 2019, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1.
Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2019

Indikator Pembangunan	Target 2019
Pertumbuhan ekonomi (%)	5,2 – 5,6
Tingkat pengangguran terbuka (%)	4,8 – 5,2
Angka kemiskinan (%)	8,5 – 9,5
Rasio gini (indeks)	0,38 - 0,39
Indeks pembangunan manusia (IPM)	71,98

Sumber : RKP 2019

4.1.2. Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

Pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2019 diarahkan pada upaya pencapaian sasaran dan target akhir tahap III pembangunan jangka menengah tahun 2015-2019, yang dirumuskan dengan memperhatikan hasil kinerja pembangunan tahun-tahun sebelumnya serta mempertimbangkan berbagai permasalahan serta isu strategis yang berkembang yang kemudian difokuskan pada tema "*Peningkatan Daya Saing Daerah Melalui Pemerataan Pembangunan dan Pemanfaatan Iptek*". Tema pembangunan tersebut diupayakan guna mencapai target sasaran makro pembangunan Jawa Tengah Tahun 2019, yaitu :

- a. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,4 – 5,8%;
- b. Inflasi sebesar $4 \pm 1\%$;
- c. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 71,60;
- d. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,33 – 4,43%;
- e. Angka Kemiskinan sebesar 9,57 – 10,57%;
- f. Indeks Gini sebesar 0,30.

4.1.3. Sasaran Pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2019

Sasaran pembangunan merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tujuan yang ingin dicapai, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program-program pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Sasaran pembangunan daerah Kabupaten



Klaten pada Perubahan Tahun 2019 merupakan suatu kesatuan dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Tahun 2016-2021 dan juga memperhatikan hasil kinerja pembangunan sampai dengan tahun sebelumnya serta dinamika pembangunan daerah yang selaras dengan isu strategis dan permasalahan yang ada. Arah pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2019 diarahkan untuk *"Memacu pembangunan infrastruktur dan ekonomi untuk meningkatkan daya saing daerah serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah"*. Arah pembangunan diharapkan dapat mencapai target sasaran makro pembangunan daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019, yang sejalan dengan pencapaian sampai dengan tahun 2018 perlu dilakukan penyesuaian sebagaimana digambarkan pada tabel 4.2.

Tabel 4.2.
Perubahan Sasaran Makro Pembangunan Daerah
Kabupaten Klaten Tahun 2019

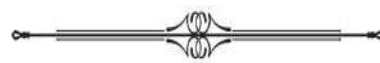
Indikator Sasaran Makro	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Status Perubahan
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,4 – 5,5	5,4 – 5,5	<i>tetap</i>
Tingkat pengangguran terbuka (%)	4,13	2,8 – 3,0	<i>meningkat</i>
Angka kemiskinan (%)	13,41%	11,90 – 12,40%	<i>meningkat</i>
Indeks pembangunan manusia (IPM)	75,45	75,45	<i>tetap</i>
Laju Inflasi (%)	2,3 – 2,5	2,3 – 2,5	<i>tetap</i>

Sedangkan gambaran lengkap target sasaran pembangunan daerah dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah pada tahun 2019, dapat disajikan dalam tabel 4.3.

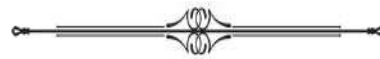


Tabel 4.3.
Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019
Berdasarkan Tujuan Pembangunan Daerah

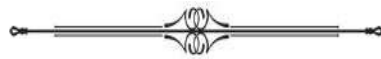
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja	Satuan
1	Mewujudkan pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi masyarakat	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi masyarakat	Angka Partisipasi Kasar PAUD	92,79	Angka
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	96,03	Angka
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	89,08	Angka
			Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	83,10	Angka
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	65,44	Angka
			Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	96,67	Angka
			Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,01	Angka
			Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,05	Angka
			Angka Kelulusan SD/MI	97,81	Angka
			Angka Kelulusan SMP/MTs	95,58	Angka
			Persentase kenaikan kunjungan perpustakaan	7,75	%
2	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas derajat kesehatan masyarakat	Persentase balita gizi buruk	0,72	%
			Angka kematian ibu melahirkan	12	Angka
			Angka kematian bayi	11	Angka



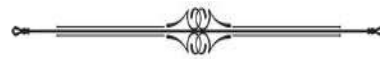
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja	Satuan
			Angka kematian Balita	15,6	Angka
3	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM yang berkarakter dan menjunjung nilai-nilai budaya	Meningkatnya kualitas SDM yang berkarakter dan menjunjung nilai-nilai budaya	Persentase kenaikan peserta festival seni dan budaya	75	%
			Persentase kenaikan kunjungan taman budaya	10	%
4	Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif dan efisien serta akuntabel	Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif dan efisien	Persentase Konsistensi Perencanaan	83	%
			Persentase Penggunaan Data Statistik	96	%
4	Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif dan efisien serta akuntabel	Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif dan efisien	Persentase pengelolaan arsip secara baku	10,83	%
			Persentase Sistem berbasis informasi	30	%
			Persentase pengamanan informasi persandian	66	%
			Skor LPPD	2,8	Angka
			Indeks Profesionalitas ASN	87	Indeks
			Skor LKjIP	66	Angka
			Opini Kemenkeu terhadap kapasitas fiskal daerah	0,41-0,5	Angka
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	Opini
		Tingkat Maturitas SPIP	3	Level	
		Tingkat kapabilitas APIP	3	Level	



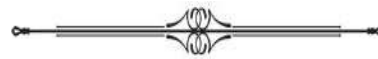
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja	Satuan
5	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya dan berkembangnya produktifitas, nilai tambah dan daya saing sektor pertanian dan ketahanan pangan	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	12,20	%
			Indeks kecukupan pangan	91,55	Angka
			Skor Pola Pangan Harapan	92,25	Angka
			Tingkat Konsumsi Ikan	19,61	Angka
			Persentase Kerusakan Hutan dan Lahan Kritis	15,50	%
		Meningkatnya dan berkembangnya produktifitas, nilai tambah dan daya saing sektor Indagkop, UMKM dan PM	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	34,98	%
			Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	19,12	%
			Persentase UMKM yang memiliki daya saing	20	%
			Persentase kenaikan koperasi aktif	0,40	%
			Persentase kenaikan nilai investasi		%
			PMDN	2,20	%
			PMA	2,50	%
		Meningkatnya dan berkembangnya produktifitas, nilai tambah dan daya saing sektor kepariwisataan	Persentase kenaikan kunjungan wisatawan	7	%
		Meningkatnya dan berkembangnya produktifitas, nilai tambah dan daya saing sektor ketenagakerjaan	Persentase Pencari kerja yang ditempatkan	26	%
Persentase kasus hubungan pekerja	83		%		



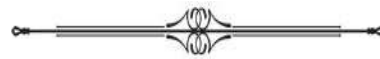
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja	Satuan
			dan perusahaan tertangani		
6	Mewujudkan pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum bagi masyarakat	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum	Persentase jalan dalam kondisi baik	60,97	%
			Persentase jembatan dalam kondisi baik	62,30	%
			Persentase drainase dalam kondisi baik	62,54	%
			Persentase irigasi dalam kondisi baik	19.126	%
			Rasio tempat pengelolaan sampah (TPS) per satuan penduduk	0,07	Rasio
			Persentase pengoperasian TPA	36	%
			Tingkat keselamatan lalu lintas	92	Angka
		Meningkatnya pemenuhan prasarana, sarana, utilitas kawasan perumahan dan permukiman	Persentase air minum layak	100	%
			Persentase sanitasi penduduk yang terlayani sistem air limbah yang layak	100	%
			Rasio luasan kawasan kumuh perkotaan	55,00	Rasio
6	Mewujudkan pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum bagi masyarakat	Meningkatnya pemenuhan prasarana, sarana, utilitas kawasan perumahan dan permukiman	Rasio cakupan elektrifikasi	98	Rasio
			Persentase ruang terbuka hijau publik kawasan perkotaan	10,50	%
			Persentase penanganan RTLH	23,41	%
7	Meningkatkan mutu dan kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Status udara	27	Angka
			Status air	37	Angka
			Lahan tutupan	27	%



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja	Satuan
7	Meningkatkan mutu dan kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya pengurangan kerentanan resiko bencana	Prosentase Desa Tangguh Bencana	80	%
		Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	93	%
8	Meningkatkan tata kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berkepribadian Pancasila	Meningkatnya keamanan dan ketertiban bagi masyarakat	Angka kriminalitas	2,8	Angka
			Rasio PMKS yang memperoleh bantuan sosial	44,78	Rasio
		Meningkatnya penegakan Peraturan Daerah	Persentase penegakan peraturan daerah	91,75	%
			Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	401	Desa/Kel
		Meningkatnya kerukunan intern dan antar umat beragama	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	29,36	Rasio
			Persentase peningkatan penyelenggaraan Forum Kerukunan Umat Beragama	75	%
9	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	Meningkatnya kapasitas perempuan dalam pembangunan	Rasio Perempuan Korban Kekerasan	1,4	Rasio
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	53,98	%
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	82	%
9	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	Peningkatan pemenuhan hak anak	Rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus	4,5	Rasio



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja	Satuan
10	Meningkatkan kualitas pelayanan publik tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	94	%
			Rasio penduduk ber-akta kelahiran per satuan penduduk	32,32	%
			Persentase peningkatan minat transmigrasi	45	%
			Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	94	%



4.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2019

Sejalan dengan sasaran pembangunan nasional tahun 2019 yang telah ditetapkan dalam RKP Tahun 2019, dalam rangka mencapai sasaran pembangunan nasional maka ditetapkan 5 (lima) prioritas pembangunan nasional, antara lain :

1. Pembangunan Manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar;

Kebijakan pada prioritas ini diarahkan pada :

- a. Percepatan pengurangan kemiskinan;
 - b. Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat;
 - c. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
 - d. Peningkatan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak; dan
 - e. Peningkatan tata kelola layanan dasar.
2. Pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman;

Kebijakan pada prioritas ini, diarahkan pada :

- a. Peningkatan konektivitas;
- b. Pengembangan telekomunikasi dan informatika;
- c. Pengembangan pusat kegiatan ekonomi di wilayah timur dan pengembangan pembangunan desa;
- d. Pembangunan daerah afirmasi; dan
- e. Pembangunan konektivitas untuk mendukung pembangunan sektor unggulan hulu-hilir perikanan.

Selain kebijakan tersebut, terdapat isu strategis antara lain :

- 1). Pembangunan konektivitas dan jaringan logistik nasional sektor unggulan;
 - 2). Peningkatan keterpaduan transportasi perkotaan dan keselamatan transportasi;
 - 3). Peningkatan sarana prasarana komunikasi dan informatika yang berdaya saing;
 - 4). Optimalisasi pembangunan kota-kota KTI untuk pertumbuhan ekonomi nasional;
 - 5). Peningkatan aksesibilitas pusat pertumbuhan, layanan kesehatan dan pendidikan di daerah tertinggal dan perdesaan;
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif;



Kebijakan pada prioritas ini, diarahkan pada :

- a. Meningkatkan ekspor dan nilai tambah pertanian melalui peningkatan produktifitas, kualitas, serta dukungan kelembagaan dan sarana prasarana;
- b. Mendorong percepatan peningkatan nilai tambah industri pengolahan melalui perbaikan iklim usaha, peningkatan investasi, penguatan rantai/nilai dan pemanfaatan inovasi;
- c. Meningkatkan nilai tambah jasa produktif antara lain melalui pengembangan destinasi wisata, ekonomi kreatif dan digital, peningkatan ekspor terutama produk hilirisasi dan penguatan kemitraan;
- d. Mendorong percepatan peningkatan keahlian tenaga kerja melalui penguatan vokasi dan kompetensi, pengembangan kerjasama dunia usaha dan kewirausahaan;
- e. Mengembangkan IPTEK dan Inovasi untuk meningkatkan produktivitas antara lain melalui peningkatan SDM dan IPTEK, pengembangan litbang keilmuan.

Selain kebijakan tersebut, terdapat isu strategis antara lain :

- 1). Peningkatan nilai tambah ekonomi dari hasil pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - 2). Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk industri;
 - 3). Optimalisasi penciptaan nilai tambah jasa produktif;
 - 4). Peningkatan produktifitas tenaga kerja; dan
 - 5). Optimalisasi pemanfaatan IPTEK dan hasil inovasi untuk peningkatan produktivitas dan penciptaan nilai tambah.
4. Pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air.

Kebijakan pada prioritas ini diarahkan pada peningkatan kuantitas dan kualitas sumber-sumber energi, pangan dan air yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat untuk melakukan segala aktivitasnya yang dilakukan melalui pelestarian lingkungan, melalui:

- a. Peningkatan produksi energi primer;
- b. Peningkatan penerapan energi baru terbarukan dalam bauran energi;
- c. Peningkatan aksesibilitas air;
- d. Peningkatan efisiensi dalam penggunaan energi dan listrik;
- e. Pemantapan dan ketahanan penyediaan pangan utama dalam negeri;
- f. Peningkatan layanan pertanian antara lain melalui penyediaan sarpras, pembiayaan, penyuluhan dan pendampingan;
- g. Perkuatan distribusi dan stabilitas harga pangan dalam rangka meningkatkan akses pangan masyarakat;



- h. Peningkatan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat terutama untuk menurunkan kasus malnutrisi;
- i. Pemantapan pembangunan infrastruktur sumber daya air;
- j. Peningkatan perlindungan sumber daya air dan ekosistemnya;
- k. Peningkatan pemenuhan kebutuhan air yang adil dan merata;
- l. Percepatan regulasi dan pembangunan wilayah berbasis DAS; dan
- m. Peningkatan kesadaran sumberdaya air

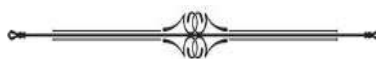
Selain kebijakan tersebut, terdapat isu strategis antara lain :

- 1). Pemenuhan kebutuhan energi
 - 2). Pemenuhan kebutuhan pangan
 - 3). Pemantapan ketahanan sumber daya air
 - 4). Upaya pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
 - 5). Perencanaan pembangunan rendah karbon
5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.
- Kebijakan prioritas ini diarahkan pada :
- a. meningkatkan kamtibmas dan keamanan siber
 - b. menjamin kesuksesan pemilu
 - c. memperkuat pertahanan wilayah nasional
 - d. meningkatkan Kepastian hukum dan reformasi birokrasi
 - e. memperkuat efektivitas diplomasi

4.2.2. Prioritas Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2019

Prioritas pembangunan Jawa Tengah Tahun 2019 dirumuskan mendasari dari analisa permasalahan dan isu-isu strategis serta difokuskan dalam rangka mencapai target sasaran pembangunan Jawa Tengah Tahun 2019 yang merupakan upaya tahun terakhir dalam penuntasan capaian sasaran dan target akhir pembangunan jangka menengah tahun 2015-2019. Dalam pelaksanaannya, mendasari tahun percepatan pencapaian tujuan pembangunan maka ditetapkan 7 (tujuh) prioritas pembangunan Jawa Tengah Tahun 2019, yaitu :

- 1. Penanggulangan Kemiskinan, difokuskan pada:
 - a. Penyediaan *basic life access* untuk penduduk miskin perkotaan dan perdesaan melalui penanganan perumahan dan penyehatan lingkungan permukiman (Rumah Sederhana Layak Huni/RSLH, sanitasi, air bersih, listrik); penanganan kawasan permukiman kumuh; penanganan rumah terdampak bencana; peningkatan akses pendidikan berupa pemberian BSM untuk 10.000 siswa, SMK Boarding School di 3 wilayah, serta pembangunan asrama SMKN di 15 kabupaten dengan angka kemiskinan tinggi; kesehatan dengan upaya untuk mencapai Universal Health Care



(UHC) atau jaminan pemeliharaan kesehatan untuk semua penduduk yang ditopang pemberian pelayanan kesehatan sesuai standar, berkualitas, dan terjangkau; pangan; pemberdayaan sosial berbasis kelompok (social group work), jaminan sosial bagi PMKS non potensial dan terlantar termasuk difabel dan lanjut usia berbasis individu dan keluarga (Sosial Case Work) serta perlindungan sosial berbasis kelembagaan melalui pelayanan sosial dalam panti serta pembangunan dan pengembangan panti pelayanan sosial sesuai standar pelayanan minimal (SPM); dan kepemilikan administrasi kependudukan berupa fasilitasi pengurusan dokumen KTP-el.

- b. Penguatan sustainable livelihood (keberlanjutan perekonomian masyarakat) melalui keberantaraan akses terhadap asset, modal, manajemen dan pasar; peningkatan start up wirausaha baru untuk 400 orang antara lain melalui ekonomi pesantren (ekotren); pemberdayaan kelompok usaha pertanian di 99 desa; peningkatan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja berkelanjutan; serta fasilitasi pengembangan BUMDes sebanyak 446 unit sesuai potensi unggulan lokal.
 - c. Penguatan basis data, basis spasial, berbasis komunitas dan pendampingan yang kontinyu, serta gotong royong pelibatan seluruh komponen potensi (swasta dan pihak lainnya) dalam kesetiakawanan sosial.
2. Penguatan daya saing ekonomi daerah, difokuskan pada:
- a. Peningkatan produktivitas pertanian dan perkebunan mendukung ketahanan pangan melalui peningkatan kemampuan petani dalam budidaya pertanian; asuransi petani; peningkatan prasarana sarana pertanian termasuk jaringan irigasi dan waduk/embung; pengembangan teknologi tepat guna di bidang pertanian dan perkebunan; revitalisasi balai benih; pengembangan kartu tani; pengembangan pertanian organik; inisiasi pertanian terintegrasi.
 - b. Peningkatan kualitas produk pertanian yang berdaya saing melalui peningkatan kemampuan petani dalam pengolahan produk pertanian untuk meningkatkan nilai tambah; serta didukung dengan pengembangan jejaring pemasaran berbasis kelompok (*corporate farming*).
 - c. Peningkatan produksi dan kualitas hasil perikanan melalui peningkatan kapasitas nelayan; peningkatan prasarana dan sarana perikanan tangkap (alat tangkap ramah lingkungan, kapal, TPI); perbaikan kualitas benih dan pakan ikan mandiri; peningkatan kualitas dan kapasitas unit pengolah ikan untuk ekspor; pengembangan kartu nelayan; perlindungan dan asuransi nelayan.



- d. Optimalisasi potensi sumber daya hutan melalui peningkatan kualitas tata kelola kehutanan; penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu SVLK) dan Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK); peningkatan keterlibatan masyarakat sebagai mitra usaha kehutanan (hutan tanaman, hutan rakyat); peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengolahan hasil hutan; serta pemanfaatan sumber daya hutan nonkayu.
 - e. Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil, dan menengah melalui peningkatan nilai tambah dan diversifikasi produk; hilirisasi industri; mengembangkan inovasi teknologi produksi; keberantaraan akses modal dari perbankan dan lembaga keuangan non perbankan; peningkatan akses pasar dengan mengembangkan digital ekonomi; pengembangan kawasan industri dan industri pada sektor yang menyerap banyak tenaga kerja; keberantaraan kemitraan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan industri besar; fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk UKM; serta peningkatan infrastruktur jaringan produksi, distribusi, promosi perdagangan antar daerah provinsi di Indonesia.
 - f. Pengembangan inovasi teknologi melalui pengembangan Technopark serta peningkatan kreativitas dan inovasi masyarakat.
 - g. Peningkatan pariwisata berbasis masyarakat (local based community) melalui perbaikan prasarana dan sarana, serta manajemen pengelolaan daerah wisata, dan meningkatkan kapasitas pelaku pariwisata; peningkatan promosi wisata; kerjasama dengan pelaku wisata; aksesibilitas menuju daerah tujuan wisata; serta peran serta swasta dan masyarakat dalam industri pariwisata.
 - h. Perbaikan iklim investasi yang semakin kondusif melalui pemberian kemudahan perijinan investasi (perijinan satu pintu, waktu perijinan, dan prosedur perijinan); perbaikan sistem dan layanan perijinan mudah, murah, cepat, tepat; kebijakan investasi sejalan dengan prioritas daerah untuk pengurangan kemiskinan dan peningkatan daya saing wilayah; pengembangan digital investment promotion; pengembangan investasi berbasis produk-produk unggulan kabupaten/kota; serta mendorong perwujudan investasi hijau.
3. Peningkatan kualitas hidup dan daya saing Sumberdaya Manusia (SDM) dalam rangka mendukung bonus demografi, difokuskan pada:
- a. Perbaikan kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan melalui peningkatan keterjangkauan biaya pendidikan melalui sekolah gratis untuk pendidikan menengah dan khusus utamanya bagi siswa dari keluarga kurang mampu berupa BOS/BOP SMA untuk 401.991 siswa, BOS/BOP SMK untuk 254.543 siswa, BOS/BOP SLB untuk 7.523 siswa;



pengembangan kurikulum berbasis skill, knowledge, attitude; pengembangan learning culture; penguatan pendidikan kejuruan dan vokasi standar nasional dan/atau standar internasional; meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik sebanyak 245 guru SLB, 140 guru SMA dan 100 guru SMK; meningkatkan manajemen mutu penyelenggaraan pendidikan; mengoptimasi peran lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam mendukung pengembangan pendidikan; mengefektifkan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam membangun strategi peningkatan kualitas pendidikan; pengembangan teknologi informasi dalam mendukung pengembangan pendidikan; peningkatan pengembangan pendidikan khusus dan inklusi sesuai kewenangan provinsi; dan mendukung pengembangan kegiatan keagamaan di daerah.

- b. Pengembangan “Rumah Sakit Tanpa Dinding” melalui sistem rujukan berbasis teknologi informasi di 7 RSUD/RSJD milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, penguatan dan fasilitasi kesehatan primer, pelayanan kesehatan di ruang publik, pengadaan rumah sakit lapangan untuk pelayanan bencana/Kejadian Luar Biasa (KLB) dan mudik, pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat melalui bakti sosial; peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi; perbaikan gizi masyarakat termasuk juga untuk mempercepat penurunan stunting di 35 kabupaten/kota; memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular; mempercepat pelaksanaan upaya promotif preventif dengan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga di 35 kabupaten/kota; peningkatan capaian wilayah Open Defecation Free (tidak buang air besar sembarangan) termasuk melibatkan peran dunia usaha; pemerataan cakupan pembiayaan pelayanan kesehatan non kuota untuk 327.000 jiwa; meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar; peningkatan pelayanan kesehatan rujukan melalui pembangunan Rumah Sakit Khusus Daerah provinsi di Kota Pekalongan dan Kota Magelang serta pengembangan Rumah Sakit Daerah Kelet dan Moewardi; peningkatan kualitas tenaga kesehatan; peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta pengawasan obat makanan dan minuman.
- c. Mempersiapkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi, kualifikasi, dan berdaya saing tinggi melalui penguatan program pendidikan link and match berbasis demand-driven; mendorong peningkatan keterampilan dan keahlian tenaga kerja berbasis kompetensi (standar, pelatihan, sertifikasi standar nasional dan/atau internasional); sertifikasi



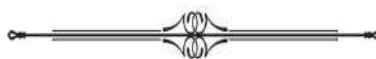
kompetensi berstandar nasional dan/atau internasional bagi lulusan pendidikan vokasi; memperluas akses informasi pendidikan kejuruan dan vokasi dalam mendukung demand tenaga kerja ke depan; mendorong kebijakan pengembangan pusat-pusat ekonomi baru; mengembangkan budaya inovatif; dan mendorong kebijakan afirmatif untuk pemanfaatan tenaga kerja lokal.

- d. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak, serta pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana melalui peningkatan keterlibatan perempuan dalam pembangunan; peningkatan upaya pencegahan dan kualitas layanan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak; peningkatan pemenuhan hak anak; penyusunan kebijakan pengendalian penduduk serta peningkatan kesertaan KB MKJP, penurunan unmetneed KB, peningkatan peran bina keluarga balita, bina keluarga remaja dan bina keluarga lansia, dan peningkatan kelompok Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
- e. Peningkatan peran serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) melalui penguatan pengetahuan dan ketrampilan dalam mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- f. Pengembangan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi untuk peningkatan minat dan budaya baca masyarakat melalui sistem otomasi perpustakaan yang terintegrasi dengan pelayanan online system (RFID untuk keamanan bahan perpustakaan dan pengembalian buku otomatis oleh pemustaka), serta kemudahan akses koleksi buku melalui smartphone berbasis android (iJateng).
- g. Peningkatan kesadaran dan pemberdayaan kepemudaan melalui peningkatan karakter dan nasionalisme pemuda sebanyak 2.663 orang serta pengembangan generasi muda mandiri dan berdikari melalui pola kemitraan, pengembangan kepedulian dan kepeloporan pemuda dalam pembangunan, peningkatan daya tangkal pemuda terhadap pengaruh destruktif, pemberdayaan organisasi kepemudaan dan kepramukaan.
- h. Pembibitan, pembinaan dan pemasyarakatan serta kelembagaan olahraga, penyelenggaraan kompetisi olahraga berkelanjutan, pengembangan olahraga unggulan daerah, peningkatan partisipasi masyarakat dalam berolahraga dan pembudayaan/pemasalahan olahraga untuk 15.000 orang, peningkatan kualitas sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan, peningkatan mutu dan manajemen organisasi olahraga, dan pengembangan industri olahraga.
- i. Pembinaan dan pengembangan kebudayaan melalui pengembangan seni budaya, fasilitasi rumah budaya, pelestarian cagar budaya, dan



pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di 35 kabupaten/kota.

- j. Peningkatan kesejahteraan lanjut usia melalui rehabilitasi lansia miskin terlantar; jaminan sosial lansia dengan bantuan permakanan bagi lansia non potensial; jaminan kesehatan bagi lanjut usia; perlindungan dan pemanfaatan pelayanan bagi lansia antara lain melalui penyediaan loket khusus lansia di puskesmas, penyediaan ruang tunggu khusus lansia; aksesibilitas ramah lansia dan difabel; peningkatan taraf hidup bagi lansia potensial.
4. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta penanggulangan bencana, difokuskan pada:
 - a. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui rehabilitasi hutan dan lahan, perhutanan sosial, konservasi daerah hulu dan tangkapan air berbasis pemberdayaan masyarakat; perkuatan Lembaga Masyarakat Di sekitar Hutan (LMDH); pengelolaan sumber daya air dengan konservasi sumber air, pengendalian banjir, pengendalian pemanfaatan air tanah; pengelolaan, pengendalian perijinan dan pengawasan usaha pertambangan; pengelolaan wilayah pesisir dengan rehabilitasi kawasan mangrove, terumbu karang dan pesisir; pengelolaan lingkungan dengan pengendalian pencemaran air, tanah, dan udara, pengelolaan limbah secara komunal berbasis kawasan dan masyarakat, dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengelola sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
 - b. Penanggulangan bencana berbasis pengurangan risiko bencana melalui peningkatan kapasitas, memperkuat kebijakan dan kelembagaan, pengembangan sistem informasi, penanganan tematik daerah rawan bencana, memperkuat kesiapsiagaan dan penanganan darurat, serta mengembangkan sistem rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
 5. Perwujudan ketahanan Pangan dan Energi, dengan fokus pada:
 - a. Perwujudan ketahanan pangan masyarakat dan daya saing pangan melalui peningkatan ketersediaan pangan dengan mempertahankan luasan lahan pertanian; penyediaan sarana pangan lokal, pengolahan, cadangan pangan, meningkatkan kewirausahaan, manajemen dan korporasi tani, serta distribusi pangan; inisiasi sistem logistik daerah; peningkatan aksesibilitas pangan dengan menjaga stabilitas harga dan pasokan; peningkatan konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) dengan pengembangan diversifikasi pangan, membangun kesadaran masyarakat terhadap pangan beragam, nilai tambah dan keragaman produk pangan; peningkatan mutu dan



- keamanan pangan; Pengembangan dan penerapan inovasi pengolahan pangan.
- b. Pemerataan akses energi dan listrik melalui penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan dengan meningkatkan koordinasi dengan PLN sebagai penyedia jaringan listrik dan pengembangan listrik perdesaan; pengembangan listrik murah dan hemat; pengembangan energi baru terbarukan dengan pemanfaatan biogas, biomassa, gas rawa, mikro hidro dan tenaga surya; serta budaya hemat energi.
6. Pengurangan kesenjangan wilayah, dengan fokus pada:
- a. Penguatan infrastruktur konektivitas melalui peningkatan kehandalan dan keselamatan jalan-jembatan mendukung pengembangan kawasan strategis dan pemerataan antara wilayah,serta menghubungkan pantura-pansela dan daerah perbatasan; pengembangan angkutan umum lintas regional, perkotaan-perdesaan; peningkatan sarana prasarana simpul dan pepaduan moda transportasi (terminal, pelabuhan, bandara, dan stasiun).
 - b. Pemerataan prasarana sarana dasar dan ekonomi melalui penyediaan rumah umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah; peningkatan jaringan air minum layak berbasis kawasan dan masyarakat; meningkatkan kualitas dan kapasitas pasar, pusat perdagangan, dan pusat jasa lainnya.
 - c. Menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru di wilayah selatan, barat dan timur yang diwujudkan dengan penetapan kawasan peruntukan industri baru wewenang provinsi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRWP) yaitu 3 kawasan industri (Kabupaten Rembang, Brebes, Kebumen) dan dukungan dana untuk pengembangannya serta meningkatkan peran dan fungsi perkotaan yang semula Pusat Kegiatan Lokal (PKL) menjadi Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp).
7. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah, difokuskan pada:
- a. Peningkatan pelayanan publik dengan membangun pemerintah yang melayani melalui upaya perkuatan keterbukaan informasi, transparansi, serta mendorong partisipasi publik dalam rangka menuju nilai IKM 8,00;
 - b. Perwujudan pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang inovatif, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam birokrasi; membangun sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja melalui penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian nilai SAKIP 80,00 (A);



- meningkatkan pengawasan melalui perkuatan kapabilitas Aparatur Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP) dengan tingkat maturitas APIP sampai pada level 3 dan perkuatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) menuju nilai 3,1; meningkatkan pengendalian produk hukum, dan penegakkan perda; meningkatkan profesionalisme ASN melalui peningkatan kinerja, kompetensi, disiplin, dan penataan ASN;
- c. Perwujudan kelembagaan birokrasi yang profesional melalui perbaikan tata laksana organisasi; peningkatan efisiensi dan efektivitas kelembagaan dengan melakukan evaluasi berkala pada kinerja kelembagaan menuju struktur berbasis kinerja; peningkatan profesionalisme ASN dalam upaya-upaya *clean and clear government* dan menerapkan “*keperantaraan dan enterpreneur*” dalam tata kelola pemerintahan.
 - d. Peningkatan kualitas kehidupan demokrasi dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan serta kondusivitas wilayah Jawa Tengah dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Pemilu Legislatif dan pencapaian skor IDI 70,60

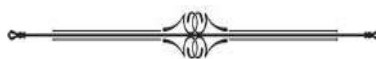
4.2.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2019

Prioritas pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2019 merupakan implementasi pelaksanaan kebijakan umum dan pentahapan pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021. Arah kebijakan yang ditempuh mempertimbangkan dinamika yang berkembang dalam pelaksanaan tahapan pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan arah kebijakan pembangunan tingkat Provinsi dan Pusat yang kemudian dirumuskan kedalam 7 (tujuh) prioritas pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2019, yaitu :

1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengurangan tingkat pengangguran melalui upaya :
 - a. Pemenuhan layanan kebutuhan dasar masyarakat (pendidikan, kesehatan, perumahan) melalui pemberian beasiswa miskin, pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin non kuota APBN, penanganan perbaikan rumah tidak layak huni, penyediaan dan peningkatan akses jamban keluarga yang layak, penyediaan layanan akses listrik bagi keluarga kurang mampu;
 - b. Jaminan perlindungan sosial bagi masyarakat rumah tangga miskin;
 - c. Pemberdayaan ekonomi produktif melalui pemberdayaan UMKM;
 - d. Penumbuhkembangan wirausaha baru dalam rangka menciptakan lapangan kerja mandiri berbasis usaha kecil menengah;



- e. Penyelenggaraan kursus dan pelatihan keterampilan kerja bagi masyarakat usia angkatan kerja yang belum bekerja.
2. Penguatan potensi ekonomi lokal melalui peningkatan dan pengembangan sektor pertanian/perkebunan, perdagangan, pariwisata, industri dan UKM serta koperasi, dengan fokus pada :
 - a. Peningkatan kualitas, kuantitas dan produktifitas pertanian/perkebunan;
 - b. Peningkatan kualitas, kuantitas dan produktifitas perikanan dan peternakan;
 - c. Peningkatan kualitas dan produktifitas perdagangan;
 - d. Peningkatan daya tarik dan daya saing kepawirisataan;
 - e. Peningkatan dan pengembangan produktivitas, nilai tambah dan daya saing, Industri Kecil Menengah, koperasi dan UKM;
 - f. Peningkatan dan pengembangan investasi daerah.
3. Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah, dengan fokus pada :
 - a. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur (jalan, jembatan, drainase;
 - b. irigasi) yang menjadi kewenangan, daerah rawan bencana, perbatasan antar wilayah;
 - c. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur perumahan, permukiman dan utilitas (air minum, sanitasi, air limbah) yang berbasis masyarakat dan penyediaan layanan akses listrik;
 - d. Peningkatan kinerja dan kesadaran masyarakat dalam penataan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - e. Peningkatan sarana prasarana perhubungan dalam rangka mendukung keselamatan jalan serta pengembangan sistem transportasi.
4. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan, dengan fokus pada:
 - a. Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, formal dan non formal melalui pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi bangunan kelas, pengadaan sarana prasana pembelajaran;
 - b. Penguatan sekolah-sekolah perbatasan;
 - c. Pemenuhan Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang mempunyai kompetensi;
 - d. Peningkatan kualifikasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e. Pemerataan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
 - f. Penyelenggaraan pelatihan/workshop bagi masyarakat;
 - g. Peningkatan kesejahteraan bagi tenaga pendidik dan kesehatan;



- h. Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana pelayanan kesehatan melalui pembangunan puskesmas pembantu (Pustu), revitalisasi poliklinik desa (Polindes), pengadaan alat kesehatan;
 - i. Pemerataan kualifikasi tenaga kesehatan dan penyelenggara pelayanan kesehatan melalui akreditasi puskesmas dan rumah sakit, sertifikasi tenaga kesehatan, optimalisasi tenaga kesehatan di tingkat desa.
5. Peningkatan pelayanan publik melalui penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik serta reformasi birokrasi, dengan fokus pada :
- a. Pendekatan pelayanan kepada masyarakat dengan meningkatkan kecepatan, kemudahan, kepastian dan transparansi pelayanan;
 - b. Peningkatan koordinasi dalam upaya menjaga kondusivitas wilayah melalui optimalisasi forum komunikasi pimpinan daerah (Forkompinda) serta forum komunikasi lintas instansi vertikal;
 - c. Peningkatan kapasitas akuntabilitas kinerja pemerintah;
 - d. Penguatan pengawasan untuk mewujudkan Pemerintah Kabupaten Klaten yang bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme melalui implementasi rencana aksi pencegahan dan penanggulangan korupsi, penerapan sistem pengendalian intern pemerintahan, optimalisasi satuan tugas sapu bersih pungutan liar (Saberpungli);
 - e. Optimalisasi penanganan pengaduan masyarakat melalui berbagai media elektronik ataupun media langsung;
 - f. Penguatan sistem manajemen sumberdaya manusia aparatur pemerintahan serta pengembangan kapasitas dan kualitas pegawai ASN di lingkup Pemerintahan Kabupaten Klaten;
 - g. Penguatan dan penataan organisasi perangkat daerah melalui penataan tatalaksana yang meliputi sistem, proses dan prosedur kerja yang efektif dan efisien, terukur yang mengarah pada prinsip-prinsip good governance dan clean governance.
 - h. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik dan manajemen penyelenggaraan pemerintahan;
 - i. Penataan peraturan dan produk hukum daerah melalui jaringan dokumentasi informasi hukum (JDIH) serta sosialisasi produk hukum daerah; pengawasan dan penanganan pelanggaran peraturan daerah, serta monitoring dan evaluasi secara berkala;
 - j. Percepatan pelaksanaan Tindaklanjut atas hasil pemeriksaan;
6. Peningkatan pelestarian lingkungan hidup dan pengurangan resiko bencana, dengan fokus pada :
- a. Pemenuhan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;



- b. Peningkatan kinerja dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
 - c. Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
 - d. Pengendalian kegiatan pertambangan yang dapat merusak lingkungan
 - e. Rehabilitasi dan konservasi sumberdaya hutan.
 - f. Pemenuhan sarana prasarana penanggulangan bencana;
 - g. Peningkatan kesadaran masyarakat akan resiko bencana dan penyediaan logistik kebutuhan penanggulangan bencana.
7. Penguatan ketahanan pangan guna mendukung kedaulatan pangan nasional melalui pembangunan sektor pertanian serta pengembangan dan pemanfaatan energi yang berkelanjutan, dengan fokus pada :
- a. Perlindungan lahan pangan berkelanjutan (sawah lestari);
 - b. Pengembangan sistem pertanian terpadu berbasis teknologi;
 - c. Pengembangan agribisnis tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - d. Pemenuhan sarana prasarana produksi pertanian;
 - e. Optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan;
 - f. Pembangunan dan pengisian lumbung pangan masyarakat;
 - g. Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi ternak dan perikanan;
 - h. Efisiensi pemanfaatan energi; peningkatan pemanfaatan energi alternatif dan optimalisasi pemanfaatan energi terbarukan.



BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Perubahan RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2019 merupakan upaya perwujudan pencapaian target-target pembangunan daerah yang disusun dalam rangka menjamin konsistensi perencanaan dan penganggaran dengan melakukan perubahan/pergeseran program/kegiatan. Perubahan/pergeseran program dan kegiatan meliputi perubahan target capaian, lokasi kegiatan, kelompok sasaran yang disertai dengan pagu indikatif, dengan memperhatikan :

- a. Sinkronisasi dan penyesuaian kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang belum tertampung dalam APBD Tahun Anggaran 2019;
- b. Tingkat urgensi kegiatan yang bersifat prioritas/mendesak dan kegiatan yang mengalami perubahan.
- c. Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 mempedomani Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun lalu (Tahun 2018) dan sampai dengan triwulan II tahun berjalan (Tahun 2019);
- d. Perubahan kerangka keuangan daerah terkait pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2018.

Rencana kerja dalam Perubahan RKPD direncanakan mendasari sasaran dan fokus pada prioritas pembangunan daerah Tahun 2019. Rencana kerja berdasarkan prioritas pembangunan daerah Tahun 2019, sebagaimana tertuang dalam tabel 5.1.

Tabel 5.1.
Rencana Kerja Berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2019

No	Prioritas Pembangunan Daerah		Program Prioritas	Urusan Bidang
(1)	(2)		(3)	(4)
1	Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengurangan tingkat pengangguran	1	Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Pendidikan
		2	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Kesehatan
		3	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	
		4	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	
		5	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Ketenagakerjaan
		6	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Sosial
		7	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	



No	Prioritas Pembangunan Daerah		Program Prioritas	Urusan Bidang
(1)	(2)		(3)	(4)
		8	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Perumahan dan Pemukiman
		9	Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial	
		10	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		11	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		12	Program Pengembangan wilayah transmigrasi dan Program Transmigrasi Lokal	Transmigrasi
2	Penguatan potensi ekonomi lokal melalui peningkatan dan pengembangan sektor pertanian/perkebunan, perdagangan, pariwisata, industri dan UKM serta koperasi	1	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pangan
		2	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	
		3	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		4	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM	
		5	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	
		6	Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah	
		7	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Penanaman Modal
		8	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	
		11	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pariwisata
		12	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	
		13	Program Pengembangan Kemitraan	
		14	Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan);	Pertanian
		15	Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	
		16	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	
		17	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	
		18	Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	
		19	Peningkatan produksi hasil peternakan	



No	Prioritas Pembangunan Daerah		Program Prioritas	Urusan Bidang
(1)	(2)		(3)	(4)
		20	Peningkatan Kesejahteraan Petani	
		21	Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	
		22	Pengembangan kawasan agropolitan	
		23	Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Perdagangan
		24	Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	
		25	Program Pembinaan pedagang kakilima dan asongan	
		26	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Perindustrian
		27	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	
3	Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah	1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		2	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	
		3	Program Perencanaan Tata Ruang	
		4	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	
		5	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Perhubungan
		6	Program Pengembangan Perumahan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		7	Program Peningkatan Kualitas Pemukiman	
4	Peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan	1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pendidikan
		2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	
		3	Program Pendidikan Non Formal	
		4	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
		5	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	
		6	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
		7	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Kesehatan
		8	Program Pengawasan Obat dan Makanan	
		9	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	



No	Prioritas Pembangunan Daerah		Program Prioritas	Urusan Bidang
(1)	(2)		(3)	(4)
		10	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	
		11	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	
		12	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	
		13	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	
		14	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	
		15	Program peningkatan pelayanan kesehatan rumah sakit	
		16	Program Manajemen, Informasi dan Regulasi Kesehatan	
		17	Program Peningkatan pelayanan Kesehatan Lansia	
5	Peningkatan pelayanan publik melalui penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik serta reformasi birokrasi	1	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Adminduk
		2	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Administrasi Pemerintahan
		3	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	
		4	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan	
		5	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan	
		6	Program Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	
		7	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	
		8	Program Penyuluhan dan Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM	
		9	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Pengawasan
		10	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan



No	Prioritas Pembangunan Daerah		Program Prioritas	Urusan Bidang
(1)	(2)		(3)	(4)
		11	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Keuangan
		12	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
		13	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	
		14	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Kominfo
6	Peningkatan pelestarian lingkungan hidup dan pengurangan resiko bencana	1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Lingkungan Hidup
		2	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	
		3	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	
		4	Program Penanganan Darurat Bencana	Sosial
7	Penguatan ketahanan pangan guna mendukung kedaulatan pangan nasional melalui pembangunan sektor pertanian serta pengembangan dan pemanfaatan energi yang berkelanjutan	1	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pangan
		2	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Pertanian
		3	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	
		4	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	
		5	Program pengembangan budidaya perikanan	
		6	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	

Mendasari hasil evaluasi pembangunan daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 serta mempedomani arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019, maka rencana program dan kegiatan prioritas perubahan Tahun 2019 dijabarkan ke dalam dalam 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan dan 5 (lima) fungsi penunjang urusan pemerintahan.

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Urusan ini dijabarkan ke dalam beberapa program antara lain:

a. Program Pendidikan Anak Usia Dini

Fokus kegiatan pada kegiatan PAUD dan Penyediaan Biaya Operasional Penyelenggaraan PAUD.



- b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Fokus kegiatan pada Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah, Penambahan ruang kelas sekolah SD, Pengadaan alat praktik dan peraga siswa, Penguatan Kinerja Sekolah Perbatasan, Rehabilitasi sedang/berat ruang belajar SD, Rehabilitasi sedang/berat ruang belajar SMP, Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer, Pembangunan Ruang Belajar SD, Pembangunan Ruang Belajar SMP, Pengadaan Koleksi Buku Perpustakaan SD dan Operasional Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan.
- c. Program Pendidikan Non Formal
Fokus kegiatan pada pengembangan pendidikan keaksaraan dan Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal.
- d. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Fokus kegiatan antara lain pada pelaksanaan sertifikasi pendidik, pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, seleksi calon kepala sekolah dan pengawas, pembinaan minat bakat dan kreativitas guru sd/smp, peningkatan kapasitas tenaga kependidikan dan pengawas, peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan.
- e. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Fokus kegiatan pada Penyusunan Data Pokok Pendidikan, Penerimaan Siswa Baru SMP Online, Operasional BOS Tingkat SD, Operasional BOS Tingkat SMP, Manajemen Pendataan Pendidikan.

2. Kesehatan

Urusan ini dijabarkan ke dalam beberapa program antara lain:

- a. Program obat dan perbekalan kesehatan
Fokus pada kegiatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan.
- b. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Fokus pada kegiatan peningkatan kesehatan keluarga dan pendampingan polindes.
- c. Program Pengawasan Obat dan Makanan;
Fokus pada kegiatan pembinaan pengawasan obat dan makan .
- d. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Fokus pada kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat.
- e. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Fokus pada kegiatan upaya perbaikan gizi keluarga pembinaan kewaspadaan pangan dan gizi.
- f. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Fokus pada kegiatan peningkatan kesehatan lingkungan.



- g. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Fokus pada kegiatan pengendalian penyakit menular langsung dan penyakit tidak menular, penanggulangan kejadian luar biasa (KLB), pengendalian penyakit bersumber binatang.
- h. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Fokus pada kegiatan kemitraan pelayanan jasa kesehatan masyarakat miskin (bpjs).
- i. Program peningkatan pelayanan kesehatan rumah sakit
Fokus pada Peningkatan pelayanan kesehatan rumah sakit daerah

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang diprioritaskan dalam rangka pemenuhan sarana prasarana infrastruktur daerah. Jabaran programnya antara lain :

- a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Fokus kegiatan pada : peningkatan jalan terutama di ruas jalan yang merupakan perbatasan antar wilayah kecamatan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan jalur evakuasi bencana. Pengawasan pembangunan jalan dan jembatan juga menjadi fokus kegiatan di program ini.
- b. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
Fokus kegiatan pada : Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong dan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di lokasi yang ketika hujan wilayahnya tergenang lama yaitu Desa Jonggrangan Kecamatan Klaten Utara dan Desa Gergunung Kecamatan Klaten Utara.
- c. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Fokus kegiatan pada pemeliharaan rutin jalan dan jembatan se Kabupaten Klaten untuk mendukung target capaian tahun 2019.
- d. Program Pengembangan, Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
Fokus kegiatan pada : Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi di 40 Daerah Irigasi seluas 1503 hektar, Operasi Irigasi, Perencanaan jaringan irigasi/bendung, serta Pembinaan/penyuluhan teknis irigasi kepada P3A/GP3A.
- e. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
Fokus kegiatan pada : Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya di Embung Madirido dan Embung Karangasem, Operasi dan pemeliharaan (OP) sungai di 30 bendung, Pengadaan bahan penanganan banjir, serta Rehabilitasi kawasan sumber air di Sumber Mbudo dan Sumber Ngruweng.



f. Program Perencanaan Tata Ruang

Fokus kegiatan pada : Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Delanggu, Prambanan, Jatinom, Wedi, Ceper, dan Tulung; melakukan Perencanaan dan Koordinasi Rencana Tata Ruang terutama dalam rangka penyelesaian proses revisi RTRW Kabupaten Klaten; serta Survey dan pemetaan untuk membuat 4 peta tematik yang mendukung proses revisi RTRW.

g. Program Pemanfaatan Ruang

Fokus kegiatan pada : Penyusunan norma, standar, dan kriteria pemanfaatan ruang serta kegiatan Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang.

h. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Fokus kegiatan pada : Pengawasan pemanfaatan ruang; monitoring dan pengendalian bangunan, Penunjang Operasional Tim SIUJK Kabupaten serta kegiatan Pembuatan Billboard/Papan Reklame dan sejenisnya.

i. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Fokus kegiatan pada : Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah di 7 desa, Pengembangan sistem distribusi air minum di 12 desa, Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (BLM) di 7 desa.

j. Program pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung

Fokus kegiatan pada : Pembangunan Gedung Milik Daerah di 13 lokasi, Penyusunan Dokumen Bangunan Gedung/Kantor serta Rehabilitasi/pemeliharaan gedung milik daerah di 7 lokasi.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Sasaran untuk meningkatnya pemenuhan prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan dan permukiman menjadi fokus dari urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Pelaksanaan urusan ini diprioritaskan dalam rangka pemenuhan sarana prasarana infrastruktur daerah. Jabaran programnya antara lain:

a. Program Pengembangan Perumahan

Fokus kegiatan pada Biaya Operasional Pendampingan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di 150 unit RTLH.

b. Program Peningkatan Kualitas Pemukiman

Fokus kegiatan pada Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana sosial di 2750 unit RTLH.



5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Urusan ini dijabarkan ke dalam beberapa program antara lain:

- a. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
Fokus pada kegiatan cipta kondisi ideologi politik ekonomi sosial dan budaya, patroli trantibum di wilayah kabupaten klaten, dan pemetaan kawasan rawan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- b. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal;
Fokus pada kegiatan peningkatan koordinasi Tim Kewaspadaan Dini Daerah, pencegahan dan pemberantasan narkoba dan peningkatan koordinasi keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- c. Program pengembangan wawasan kebangsaan;
Fokus pada kegiatan peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama, Peningkatan Pembinaan dan Pemantapan Kesadaran Bela Negara, Dialog/Forum Wawasan Kebangsaan.
- d. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan;
Fokus pada kegiatan Peningkatan dan pembinaan Korps Musik dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan.
- e. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan;
Fokus pada kegiatan optimalisasi pengamanan penertiban wilayah Kabupaten Klaten, pemantapan keamanan wilayah dalam upaya perlindungan masyarakat.
- f. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat);
Fokus pada kegiatan Penertiban dan Penindakan terhadap pelanggaran Perda, Pembinaan penegakan Perda/Perbub, Operasi-operasi PGOT, WTS dan MIRAS.
- g. Program peningkatan dan pembinaan kehidupan sosial politik;
Fokus pada kegiatan Koordinasi Forum-forum Pembauran, Kerukunan, Kewarganegaraan dan Kebangsaan.
- h. Program Peningkatan Penanganan Bencana Kebakaran;
Fokus pada kegiatan peningkatan kapasitas petugas pemadam kebakaran, penyusunan kebijakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

6. Sosial

Adapun program-program yang mendukung pencapaian target urusan sosial adalah sebagai berikut :

- a. Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya).
Fokus pada kegiatan Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin, Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial .



b. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.

Fokus pada kegiatan Pemberdayaan Organisasi/lembaga Sosial dan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Fasilitasi Rehabilitasi Bersumber daya Masyarakat (RBM).

c. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.

Fokus pada kegiatan peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS, Rehabilitasi dan pembinaan penyandang masalah kesejahteraan social, Peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial anak terintegratif.

d. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.

Fokus pada kegiatan Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin dan Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.

e. Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Fokus pada kegiatan Pelatihan dan Simulasi Pengurangan Resiko Bencana, Penyelenggaraan Sekolah Sungai, Pembentukan Desa Tangguh Bencana di 2 desa, dan Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana.

f. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

Fokus pada kegiatan Koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana serta Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Hibah Rehab dan Rekon) di 2 jembatan yang terkena bencana.

g. Program Penanganan Darurat Bencana

Fokus pada kegiatan Koordinasi, pemantauan dan operasional penanganan darurat bencana; Pengembangan dan pemberdayaan Tim Reaksi Cepat (TRC); Droping Air Bersih; Penyediaan Dana Siap Pakai; serta Pengadaan sarana prasarana penanganan bencana.

B. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Pelaksanaan urusan tenaga kerja diprioritaskan dalam rangka pemenuhan target Angka partisipasi angkatan kerja, Partisipasi angkatan kerja perempuan, Persentase pencari kerja yang ditempatkan dan Tingkat pengangguran terbuka

a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Fokus pada kegiatan Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja dan kegiatan pembinaan tenaga kerja AKAD

b. Peningkatan Kesempatan Kerja

Fokus pada kegiatan Penyusunan informasi bursa tenaga kerja, penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja.

Adapun hasil/outcome serta manfaat yang menjadi target dari pelaksanaan program pada urusan ketenagakerjaan sebagai berikut :



- 1) Meningkatnya dan pengembangan produktifitas, nilai tambah dan daya saing sektor ketenagakerjaan, dengan capaian persentase pencari kerja yang ditempatkan.
- 2) Meningkatnya pemahaman hukum ketenagakerjaan yang berdampak kepada peningkatan situasi ketenagakerjaan yang semakin kondusif.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Adapun program-program yang mendukung pencapaian target urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah sebagai berikut :

- a. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Fokus pada kegiatan peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak, Advokasi Penguatan Kelembagaan PUG, Sosialisasi, Advokasi dan Pengembangan Sistem Data Gender dan Anak.
- b. Peningkatan Kualitas Hidup dan perlindungan perempuan dan anak
Fokus pada kegiatan Penanganan dan Pencegahan korban kekerasan berbasis gender dan anak termasuk trafficking dan sosialisasi deteksi dini kekerasan terhadap anak.
- c. Peningkatan peran serta anak dan kesetaraan gender dalam pembangunan
Fokus pada kegiatan peningkatan kemampuan dan akses berusaha bagi perempuan pada sumber daya ekonomi dan Peningkatan peran serta Organisasi Wanita.



3. Pangan

Urusan Pangan difokuskan pada Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat. Fokusnya pada kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan, Pengembangan Diversifikasi Pangan, Pembinaan dan Pengembangan Desa Mandiri/Rawan Pangan, Pengembangan Rumah Pangan Lestari, Pembinaan dan Pengembangan Lumbung Pangan.

4. Pertanahan

Urusan Pertanahan diarahkan pada sasaran untuk terlaksananya penanganan/fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan yang terjadi di Kabupaten Klaten; terselenggaranya validasi tanah aset Pemerintah Kabupaten Klaten, dan penurunan persentase alih fungsi tanah pertanian menjadi non pertanian.

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Pertanahan adalah:

- a. Penataan Penguasaan, Pemilikan, penggunaan dan Pemanfaatan Tanah;
- b. Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan;

5. Lingkungan Hidup

Urusan lingkungan hidup diarahkan untuk meningkatkan mutu dan kualitas lingkungan hidup. Dalam upaya untuk menaikkan indeks kualitas lingkungan hidup dilakukan dengan sasaran untuk peningkatan pengendalian dan penurunan tingkat kerusakan lingkungan hidup. Indikasi program yang akan dilaksanakan antara lain:

a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Fokus kegiatan pada : Peningkatan operasional dan pemeliharaan sarana pengelolaan prasarana persampahan sebanyak 18000 ton sampah terangkut di TPA, Rehabilitasi/Pemeliharaan Tempat Pengelolaan Sampah di 3 TPS, penyediaan sarpras Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), Pengadaan sarana prasarana pengelolaan persampahan, Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan, pembinaan bank sampah, pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah (Bank Sampah), Pengolahan sampah 3R.

b. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Fokus kegiatan pada : Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura, Operasional laboratorium lingkungan, dan Pembangunan Instalasi Pembuangan Air Limbah.

c. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Fokus kegiatan pada : Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air seluas 3 ha, Pengendalian Dampak Perubahan Iklim, dan Penghijauan Jalan Dalam Kota sepanjang 7 km.



- d. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Fokus kegiatan pada : Penyusunan Profil Menuju Indonesia Hijau dan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah.
- e. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Fokus kegiatan pada : Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH), Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), serta Pengadaan Sarana Prasarana Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- f. Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Fokus kegiatan pada : Gerakan Desa Ramah Lingkungan, peningkatan Sekolah Adiwiyata, Pembinaan Saka Kalpataru.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Fokus pada kegiatan implementasi sistem administrasi kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan), peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan dan catatan sipil serta pengembangan sistem administrasi kependudukan terpadu.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Adapun program-program yang mendukung pencapaian target urusan pemberdayaan masyarakat dan desa adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Fokus pada kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), peningkatan perencanaan partisipatif pembangunan desa dan kegiatan peningkatan, penguatan kelembagaan posyandu dan pengelolaan adat istiadat dan nilai sosial desa.
- b. Pengembangan lembaga ekonomi perdesaan
Fokus pada kegiatan pembinaan lembaga ekonomi masyarakat dan peningkatan pembangunan kawasan pedesaan.
- c. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
Lokus pada kegiatan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), Peningkatan Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (BBGRM), Pemanfaatan Tehnologi Tepat Guna/ TTG dan Fasilitasi sistem informasi desa/SID.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Adapun program-program yang mendukung pencapaian target urusan sosial adalah sebagai berikut :

- a. Program Keluarga Berencana



Dengan fokus pada kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Penyuluhan KB, Pengadaan Sarana KIE Kit dan Media Lini Lapangan dan Pengadaan Bina Keluarga Balita/BKB KIT.

- b. Program Pengendalian dan Pengawasan Pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Fokus kegiatan pada Penyusunan Parameter Kependudukan

- c. Program Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

Fokus pada kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Kelompok BKB, BKL dan BKR

- d. Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Fokus pada kegiatan sosialisasi kesehatan reproduksi remaja

- e. Program Pelayanan kontrasepsi

Fokus pada kegiatan pelayanan KB medis operasi, pelayanan KB melalui mobil pelayanan, pelayanan KB dengan Mitra Kerja.

9. Perhubungan

Pembangunan di bidang urusan perhubungan diarahkan untuk meningkatkan angka tingkat keselamatan lalu lintas. Target tersebut diterjemahkan dengan program sebagai berikut:

- a. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Fokus kegiatan pada : Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Traffic Light, Rehabilitasi / Pemeliharaan Marka Jalan, Rehabilitasi / Pemeliharaan Rambu-rambu Lalu lintas.

- b. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Fokus kegiatan pada : Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang dan Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan.

- c. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Fokus kegiatan pada : Pengadaan rambu-rambu lalu lintas, Pengadaan marka jalan, Pengamanan Lalu Lintas Jalan, Operasional Penertiban Angkutan Galian Golongan C, Car Free Day Kabupaten, Pengadaan dan Pemasangan Guardrail, Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light, Pengendalian Operasional Lalu Lintas, dan Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan, dan Pengelolaan Tempat Parkir.

- d. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor.

Fokus kegiatan pada : Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor dan Pengadaan buku uji, tanda uji dan kelengkapannya.



10. Komunikasi dan Informatika

Adapun hasil/outcome serta manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program pada urusan komunikasi dan informatika adalah sebagai berikut:

- a. Terlaksananya penyebaran informasi pembangunan kepada masyarakat melalui media surat kabar dan media elektronik (radio dan televisi);
- b. Tersebarinya informasi pembangunan kepada masyarakat melalui website pemerintah;
- c. Tersedianya Sistem Informasi Manajemen Pemda sebanyak 35 sistem informasi untuk memberikan kemudahan akses dan data;
- d. Terlaksananya penanganan pelayanan seluruh pengaduan masyarakat; dan
- e. Meningkatnya kemampuan SDM bidang teknologi informasi.

Adapun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Fokus kegiatan pada : Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi di 160 lokasi, Pengkajian dan pengembangan sistem informasi, Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi, dan Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- b. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media
Fokus kegiatan pada : Penyebarluasan informasi pembangunan daerah, Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- c. Program Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi.
Fokus kegiatan pada : Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi.

11. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Adapun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Fokus pada kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan, Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru serta Pembinaan dan Pemberdayaan UMKM.
- b. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM
Fokus pada kegiatan Penyelenggaraan Pameran Bagi Usaha Mikro Kecil menengah (UMKM) dan Updating data UMKM.
- c. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Fokus pada kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pemberdayaan Koperasi, Revitalisasi Koperasi dan Penyelenggaraan Pelatihan Management Koperasi

12. Penanaman Modal

Rencana program dan kegiatannya antara lain:

- a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi



Fokus pada kegiatan Peningkatan kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Penyelenggaraan Promosi Investasi.

b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Fokus pada kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan kepemudaan dan olahraga antara lain:

a. Peningkatan peran serta kepemudaan;

Fokus pada kegiatan Pembinaan organisasi kepemudaan dan Peningkatan pembinaan dan pengembangan kepemudaan.

b. Peningkatan upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

Fokus pada kegiatan Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda

c. Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Fokus pada kegiatan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia bidang olahraga, penyelenggaraan kompetisi olahraga dan pengiriman kontingen olahraga.

14. Statistik

Program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Statistik adalah Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah. Fokus kegiatan pada : Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah. Hasil/outcome serta manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program pada urusan statistik sebagai berikut :

- 1) Tersedianya bahan penyebarluasan informasi pembangunan Kabupaten Malang kepada masyarakat dengan tersusunnya Kabupaten Klaten Dalam Angka (KKDA);
- 2) Tersajinya data statistik berupa laju pertumbuhan perekonomian baik secara menyeluruh maupun sektoral, serta tingkat kemakmuran melalui besarnya pendapatan per kapita;
- 3) Tersedianya data statistik sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pembangunan ekonomi dan bahan perencanaan aspek ekonomi baik jangka pendek maupun rencana pembangunan jangka menengah baik bagi pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat

15. Persandian

Program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Persandian adalah Program Peningkatan Persandian Daerah dengan fokus kegiatan identifikasi



Jenis Informasi dan Persandian dan Implementasi Operasional Persandian oleh Perangkat Daerah.

16. Kebudayaan

Program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Kebudayaan antara lain:

a. Program Pengembangan Nilai Budaya

Fokus pada kegiatan Optimalisasi Pengelolaan Situs dan Benda Cagar Budaya dan Pelestarian Peninggalan Sejarah dan Nilai - Nilai Tradisional.

b. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Fokus pada kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya, Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah, Kirab Budaya dan Pentas Seni dan Penyebarluasan informasi kekayaan budaya daerah.

17. Perpustakaan

Program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Perpustakaan yaitu Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan. Fokus pada kegiatan Pemasarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar, Pengembangan minat dan budaya baca, Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah.

18. Kearsipan

Program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Kearsipan antara lain:

a. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

Fokus pada kegiatan Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah, dengan kegiatan ini diharapkan mendorong meningkatnya koleksi arsip sehingga menarik minat pengunjung terhadap arsip daerah.

b. Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

Fokus pada kegiatan Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta .

C. URUSAN PILIHAN

1. Kelautan dan Perikanan

Program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Kelautan dan Perikanan adalah:

a. Pengembangan budidaya perikanan

b. Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

c. Pengembangan perikanan tangkap.



2. Pariwisata

Jabaran program dan kegiatannya antara lain:

a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Fokus pada kegiatan Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata, Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata, Pembinaan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) dan Penyelenggaraan Event Pariwisata.

b. Pengembangan Destinasi Pariwisata

Fokus pada kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata, Pengembangan Daerah Tujuan Wisata, Pengelolaan Obyek Wisata dan Pengembangan Destinasi Obyek Wisata.

c. Program Pengembangan Kemitraan

Fokus pada kegiatan Fasilitasi Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata dan Budaya

3. Pertanian

Jabaran program dan kegiatannya antara lain:

a. Peningkatan Ketahanan Pangan

Fokus pada kegiatan Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija, Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian dan Pengembangan Sumber-sumber Air untuk Irigasi dan Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Pertanian

b. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Fokus pada kegiatan Pengembangan Bibit Ikan Unggul, Pembinaan dan Pengembangan Perikanan dan Rehabilitasi/Pengembangan Sarana Prasarana Fisik Kawasan Budidaya Air Tawar.

c. Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Fokus pada kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan, dan Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan.

d. Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

Fokus pada kegiatan Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah

e. Peningkatan produksi hasil peternakan

Fokus pada kegiatan pada Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak yang Didistribusikan kepada Masyarakat

f. Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

Fokus pada kegiatan Penyuluhan Distribusi Pemasaran Atas Hasil Produksi Peternakan Masyarakat dan Pengembangan Agribisnis Peternakan.

g. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Fokus kegiatan pada Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak



h. Peningkatan Kesejahteraan Petani

Fokus kegiatan pada Pengadaan Alsintan

i. Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

Fokus kegiatan pada Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan

4. Kehutanan

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, terkait urusan kehutanan yang menjadi kewenangan daerah adalah pelaksanaan pengelolaan Taman Hutan Rakyat (TAHURA) kabupaten/kota. Untuk Kabupaten Klaten tidak ada wilayah TAHURA, sehingga untuk urusan ini Kabupaten Klaten di tahun 2019 tidak memiliki kewenangan.

5. Energi dan Sumber Daya Mineral

Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral diorientasikan pada target Rasio cakupan elektrifikasi 98, pembinaan dan pengawasan pertambangan. Adapun, program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan ini adalah Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan. Fokus kegiatan pada : Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) terutama di ruas jalan kabupaten perbatasan antar kecamatan dan jalur evakuasi bencana Gunung Merapi, Rehabilitasi/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) di seluruh wilayah kabupaten, serta Pendataan dan pembayaran pajak beban listrik penerangan jalan umum (PJU).

6. Perdagangan

Jabaran program dan kegiatannya antara lain:

a. Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

Fokus kegiatan pada Pensertifikasian hak merk, Fasilitasi Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), Pengadaan sarana pendukung unit metrologi legal (DAK bid. Pasar), Operasionalisasi dan pembangunan UPT kemetologian daerah

b. Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

Fokus pada kegiatan Pembangunan Pasar, Rehabilitasi/pemeliharaan bangunan pasar, Pembinaan dan pengelolaan pendapatan pasar

c. Program Pembinaan pedagang kakilima dan asongan

Fokus pada kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

7. Perindustrian

Jabaran program dan kegiatannya antara lain:

a. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah



Fokus kegiatan pada Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri, Pembinaan dan Pelatihan Industri Kreatif dan Penyusunan Profil Industri Kecil Menengah / IKM

b. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Fokus kegiatan pada Perluasan Penerapan ISO & SNI untuk Mendorong Daya Saing Industri Manufaktur dan Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri.

8. Transmigrasi

Program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Transmigrasi adalah Program Pengembangan wilayah transmigrasi dan Program Transmigrasi Lokal. Fokus pada kegiatan pendaftaran seleksi penampungan pengawalan pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigran dan kegiatan penyuluhan transmigrasi lokal.

D. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

1. Administrasi Pemerintahan

Pelaksanaan urusan bidang administrasi pemerintahan difokuskan pada program yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah antara lain mengarah pada perumusan dan penyusunan kebijakan, pengendalian, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan dukungan program antara lain :

- a. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah;
- b. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah;
- c. Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah;
- d. Program penataan peraturan perundang-undangan;
- e. Program peningkatan kapasitas kelembagaan kemasyarakatan;
- f. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa/kelurahan;
- g. Program peningkatan koordinasi pelaksanaan pembangunan;
Fokus kegiatan pada : Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan; Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan; Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan; Penyusunan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan; Penunjang operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP); serta Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
- h. Program peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- i. Program penyuluhan dan pelayanan bantuan hukum dan HAM;
- j. Program peningkatan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di Kecamatan;
- k. Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan;



- l. Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan;
- m. Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan;
- n. Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Kemasyarakatan Kelurahan; dan
- o. Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Kelurahan.

2. Pengawasan

Program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan pengawasan antara lain:

- a. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH;
Fokus pada kegiatan pelaksanaan pengawasan internal secara berkala, pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH, pencegahan dan pemberantasan pungutan liar dan peningkatan kapabilitas APIP.
- b. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan; dan
Fokus pada kegiatan Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan, Peningkatan pembinaan administrasi tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.
- c. Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan.
Fokus pada kegiatan Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan.

3. Perencanaan

Penjabaran program dan kegiatan pada urusan ini antara lain :

- a. Program perencanaan pembangunan Daerah
Fokus kegiatan pada Penyelenggaraan musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran & Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA & PPAS); Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran & Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUPA & PPAS-P); Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); Updating Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD); Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah; dan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur Perencana.
- b. Program perencanaan pembangunan ekonomi; fokus kegiatan pada Koordinasi dan perencanaan pembangunan bidang ekonomi.



- c. Program perencanaan pembangunan sosial dan budaya; fokus kegiatan pada Koordinasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya;
- d. Program perencanaan pembangunan infrastruktur pengembangan wilayah; fokus kegiatan pada Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Fisik dan Prasarana,
- e. Program pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah
Fokus kegiatan pada Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Tahunan, serta Pelaporan Pembangunan Daerah.

4. Keuangan

Program pada urusan bidang ini adalah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan fokus Kegiatan pada Pengembangan Pengelolaan Pendapatan dan Aset Daerah.

5. Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan

Fokus program urusan bidang kepegawaian dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi dan Profesionalitas ASN.

a. Program pembinaan dan pengembangan aparatur

Fokus pada kegiatan Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah, Penyelesaian Administrasi Umum Kepegawaian, Evaluasi Kinerja Pegawai, Penyusunan Formasi Kepegawaian.

b. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah, Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah, Pendidikan Manajemen Kepegawaian dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah.

6. Penelitian dan Pengembangan

Program dalam penyelenggaraan urusan bidang penelitian dan pengembangan diharapkan mampu meningkatkan prosentase inovasi daerah yang tercipta serta prosentase penerapan inovasi daerah dari hasil penelitian dan pengembangan. Program pada urusan bidang ini adalah Program penelitian dan pengembangan. Fokus kegiatan pada : Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Daerah; Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Daerah; Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa); dan Penelitian Perspektif Masyarakat terhadap kualitas Pembangunan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan perangkat daerah, direncanakan pula program yang bersifat pendukung operasional, antara lain:

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur



- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Jabaran rencana program dan kegiatan yang mendukung prioritas pembangunan Daerah beserta kerangka pendanaan pada masing-masing program dan kegiatan pada perubahan tahun 2019 berdasarkan Perangkat Daerah disajikan dalam lampiran matriks Rancangan Akhir Perubahan RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2019 sebagaimana terlampir.

